

**SKRIPSI**

**PERAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP  
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DANA  
DESA POLEWALI KECAMATAN SUPPA  
KABUPATEN PINRANG**



**OLEH**

**NURVADILLAH**

**NIM: 2120203862202042**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2025**

**PERAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP  
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DANA  
DESA POLEWALI KECAMATAN SUPPA  
KABUPATEN PINRANG**



**OLEH**

**NURVADILLAH  
NIM: 2120203862202042**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah  
(S.Akun) pada Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2025**

**PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING**

Judul Skripsi : Peran Sistem Informasi Akuntansi terhadap  
Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa  
Polewali Kecamatan Suppa Kabupaten  
Pinrang

Nama Mahasiswa : Nurvadillah

Nim : 2120203862202042

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Dekan Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam  
B4399/In.39/FEBI.04/PP.00.9/09/2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing : Sulkarnain, S.E., M.Si.

NIP. : 198805102019031005

(...S...)

Mengetahui,

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag

NIP: 197102082001122002

**PENGESAHAN KOMISI PENGUJI**

Judul Skripsi : Peran Sistem Informasi Akuntansi terhadap  
Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa Polewali  
Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Nurvadillah

Nomor Induk Mahasiswa : 2120203862202042

Program Studi : Akuntansi syariah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Dekan Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam  
B4399/In.39/FEBI.04/PP.00.9/09/2024

Tanggal Kelulusan : 24 Juli 2025

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Sulkarnain, M.Si. (Ketua)

Dr. Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak., CTA., ACPA. (Anggota)

Ira Sahara, S.E., M.Ak (Anggota)

Mengetahui,

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Muzahifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP. 197102082001122002



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Sebagai ungkapan rasa syukur yang tak terhingga, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua tercinta, Tamrin dan Rusna. Yang senantiasa memberikan semangat, doa, kasih sayang, dan dukungan tanpa henti. Segala pengorbanan dan ketulusan mereka menjadi sumber kekuatan dan motivasi terbesar bagi penulis. Tugas akhir ini penulis persembahkan dengan sepenuh hati sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam kepada beliau berdua.

Selanjutnya penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor IAIN Parepare, Prof. Dr. Hannani, M.Ag. dan para wakil Rektor yang telah memimpin kampus IAIN Parepare tempat menimba ilmu pengetahuan.
2. Ibu Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis islam, Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswanya.

3. Bapak Sulkaranian M,Si. selaku dosen pembimbing, atas segala bimbingan, arahan, dan dukungan yang telah diberikan selama proses penyusunan tugas akhir ini.
4. Ibu penguji utama I dalam hal ini Dr. Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak., CTA., ACPA. dan penguji utama II dalam hal ini Ira Sahara S.E., M.Ak., atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.
5. Ibu Ketua Program Studi Akuntansi Syariah Rini Purnamasari M.Ak., terima kasih atas kebaikan dan kemudahan yang diberikan.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Bapak dan Ibu Staf dan Admin Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam yang telah membantu dan memberikan support penulis selama studi di IAIN Parepare.
8. Kepada Perangkat Desa, BPD, Dan masyarakat Desa Polewali yang telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk dilibatkan dalam penelitian ini.
9. Kepada adik tersayang penulis, Nur Aqilah terima kasih untuk selalu percaya pada mimpi-mimpi penulis, yang selalu menjadi penyemangat serta motivasi bagi penulis, sehingga penulis bisa mencapai tahap ini.
10. Kepada sahabat-sahabat saya yakni Marsyah, Nurliah dan Afika Izati. Terima kasih sudah menjadi teman terbaik bagi penulis selama menempuh perkuliahan yang menjadi tempat saling menguatkan dan selalu kebersamaan penulis dalam perjalanan hidupnya.

11. Kepada sahabat karib penulis Friska Hamdana, Nasrah, Nirmayani, Putri Ayu ramadhani, Mia Ludina, Elsa Maheswari Syafitri, Dan Kirani Yulianti. Terima kasih atas waktu yang kalian luangkan untuk mendengarkan keluhan kesah penulis.
12. Teman-teman seperjuangan sekelas saya dari prodi Akuntansi Syariah serta teman-teman KKN posko 59 Desa Tapango Barat, saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan kebersamaan yang kalian berikan selama proses penyusunan skripsi ini.
13. Semua pihak yang telah membantu, memberikan semangat serta doanya kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih banyak.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik serta saran yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan guna perbaikan dan pengembangan penelitian ke depannya agar dapat menghasilkan karya yang lebih baik, *Aamiin*.

*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

Pinrang, 13 Juni 2025

17 Dzulhijjah 1446 H

Penulis,



Nurvadiillah

NIM: 2120203862202042

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurvadillah  
NIM : 2120203862202042  
Tempat/Tanggal Lahir : Bela-belawa, 29 September 2003  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Peran Sistem Informasi Akuntansi terhadap  
Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa Polewali  
Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Pinrang, 13 Juni 2025  
17 Dzulhijjah 1446 H

Penulis,

  
Nurvadillah  
NIM: 2120203862202042

## ABSTRAK

NURVADILLAH (2120203862202042) Peran Sistem Informasi Akuntansi terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa Polewali Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang (Dibimbing oleh Sulkarnain)

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana sistem informasi akuntansi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Polewali, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah desa tentang bagaimana mengoptimalkan penggunaan sistem informasi akuntansi. Selain itu, penelitian ini akan menambah literatur tentang bagaimana Siskeudes dapat diterapkan dengan baik dalam tata kelola keuangan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari perangkat desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana desa, BPD, maupun masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi Siskeudes berperan besar dalam meningkatkan efisiensi, ketertiban, dan keakuratan pencatatan serta pelaporan keuangan desa. Dari segi akuntabilitas, aplikasi ini mempermudah perangkat desa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban yang terstruktur dan minim kesalahan. Sementara itu, dari aspek transparansi, informasi terkait dana desa telah disampaikan melalui forum dan media informasi, meskipun masih terdapat kendala dalam penyampaian informasi yang rinci dan dapat dipahami oleh semua kalangan masyarakat. Temuan lain menunjukkan bahwa dana desa telah dimanfaatkan untuk kegiatan nyata yang berdampak langsung pada masyarakat, namun masih diperlukan upaya peningkatan dalam pemerataan pembangunan dan penyampaian informasi yang lebih terbuka.

**Kata Kunci:** Sistem Informasi Akuntansi, Transparansi, Akuntabilitas, Dana Desa

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teoritis .....	13
1. Sistem Informasi Akuntansi .....	13
2. Akuntabilitas.....	19
3. Transparansi .....	24

4. Dana Desa.....	30
5. Prinsip Akuntansi Syariah .....	34
C. Tinjauan Konseptual .....	37
D. Kerangka Pikir.....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Jenis Penelitian .....	41
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	41
C. Fokus Penelitian .....	41
D. Jenis Dan Sumber Data .....	41
E. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data.....	42
F. Uji Keabsahan Data.....	43
G. Teknik Analisis Data.....	45
<b>BAB IV.....</b>	<b>48</b>
A. Hasil Penelitian .....	48
1. Sistem Informasi Akuntansi yang Digunakan Di Desa Polewali Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.....	48
2. Peran Sistem Informasi Akuntansi Dalam meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Polewali, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.....	51
B. Pembahasan .....	58
1. Sistem Informasi Akuntansi Yang Digunakan Di Desa Polewali Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.....	58

2. Peran Sistem Informasi Akuntansi Dalam meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Polewali, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.....	62
3. Penerapan prinsip Akuntansi Syariah pada Sistem Informasi Akuntansi yang digunakan di Desa Polewali Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang .....	67
<b>BAB V.....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>76</b>
<b>BIODATA PENULIS.....</b>	<b>117</b>



## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	40
4.1	Alur penggunaan Aplikasi Siskeudes	66



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	77
2	SK Pembimbing Skripsi	93
3	Berita Acara Revisi Judul Skripsi	94
4	Surat Izin Penelitian Dari IAIN Parepare	95
5	Surat Izin Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	96
6	Surat Selesai Meneliti	97
7	Surat Keterangan Wawancara	98
8	Dokumentasi	99
9	Biodata Penulis	117

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya.

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin.

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِـو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

#### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

##### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

##### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

##### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةُ *talhah*

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birru*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

تَأْخُذُ	ta 'khuẓu
سَيَايُ	syai'un
النَّوْءُ	an-nau'u
إِنَّ	inna

### Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis ter...  
 kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim...  
 a kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka p...  
 t dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziq</i>
	<i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqūn</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	<i>Bismillāhi majrehā wa mursāhā</i>

### Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dik...

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- سَيَّئُ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis ter  
kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim  
kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka p  
t dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziq</i>
	<i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqū</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	<i>Bismillāhi majrehā wa mursāhā</i>

**huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dik

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziq*  
*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqū*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

**Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dik

-	وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/</i> <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
-	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	<i>Bismillāhi majrehā wa mursāhā</i>

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dik

erasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu di-



kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn*
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah Swt. hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

### A. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

<i>Swt.</i>	=	<i>subhānahu wata `ālā</i>
<i>saw.</i>	=	<i>Shallallahu `Alaihi wa Sallam`</i>
<i>a.s.</i>	=	<i>alaihis salam</i>
<i>H</i>	=	<i>Hijriah</i>
<i>M</i>	=	<i>Masehi</i>
<i>SM</i>	=	<i>Sebelum Masehi</i>

<i>l.</i>	=	<i>Lahir Tahun</i>
<i>w.</i>	=	<i>Wafat tahun</i>
<i>QS.../...:4</i>	=	<i>QS. al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/...., ayat 4</i>
<i>HR</i>	=	<i>Hadis Riwayat</i>

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed.* : Editor (atau, eds, [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam Bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat *ed.* (tanpa s).
- et al,* : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan *dkk*, (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet* : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj.* : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan untuk karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahannya.
- Vol.* : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam Bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata *juz*.
- No.* : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengelola data keuangan guna menghasilkan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan.<sup>1</sup> SIA memainkan peran penting dalam mencatat transaksi keuangan secara efisien dan efektif, serta memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Melalui penerapan sistem ini, seluruh transaksi keuangan dapat terdokumentasi dengan baik, sehingga mampu meminimalkan risiko kekeliruan pencatatan dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. SIA juga berfungsi sebagai alat kontrol internal yang dapat mencegah dan mendeteksi kecurangan atau penyalahgunaan dana dalam suatu organisasi, baik di sektor swasta maupun publik.<sup>2</sup>

Dalam sektor pemerintahan, khususnya pada pengelolaan anggaran publik, penerapan SIA menjadi semakin penting. Hal ini juga berlaku di tingkat pemerintahan desa, di mana pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk dana desa.<sup>3</sup> Sebagai unit pemerintahan yang berada paling dekat dengan masyarakat, desa dituntut untuk mengelola keuangannya secara tertib, transparan, akuntabel, dan partisipatif. Untuk mendukung hal tersebut, penggunaan

---

<sup>1</sup> J. A. Hall, "Accounting Information Systems.," *Cengage Learning.*, 2018.

<sup>2</sup> Susanto, A. Sistem Informasi Akuntansi: Struktur Pengendalian Risiko Pengembangan. Bandung: Lingga Jaya, (2013).

<sup>3</sup> Mulyani, et al. "The Critical Success Factors for the Use of Information Systems and its Impact on the Performance of Government Agencies." *International Journal of Business and Law*, (2020).

SIA menjadi krusial agar proses pencatatan dan pelaporan keuangan desa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>4</sup>

Pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel sangat penting, karena desa memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik kepada masyarakat dan pemerintah pusat.<sup>5</sup> Pelaporan berbasis SIA memungkinkan semua transaksi keuangan desa dicatat dengan baik dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan untuk memastikan informasi terbuka.<sup>6</sup> Selain itu, desa dapat menghindari masalah administratif seperti keterlambatan laporan atau ketidaksesuaian antara realisasi anggaran dan pelaporan keuangan dengan menggunakan sistem pelaporan yang sesuai dengan SIA. Oleh karena itu, penerapan SIA dalam pelaporan desa tidak hanya membuat laporan lebih sistematis tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.

Salah satu bentuk implementasi SIA di lingkungan pemerintah desa adalah penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Aplikasi ini ditujukan untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan secara akurat, mencegah kesalahan pencatatan manual, serta memastikan bahwa seluruh transaksi tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaporan berbasis SIA juga memungkinkan semua informasi keuangan desa tersedia secara terbuka dan dapat

---

<sup>4</sup> Kusnandar, D., "Implementasi Sistem Informasi Akuntansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, (2019).

<sup>5</sup> E. P. Sari and N. Fitriani, "Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Pelaporan Keuangan Desa: Studi Pada Desa-Desa Di Kabupaten Bantul.," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 2021.

<sup>6</sup> Indriani M and Prasetyo W, "Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Dalam Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Desa.," *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, 2022.

diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga mendorong peningkatan kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan desa.

Dalam pemerintahan desa, SIA diterapkan dalam berbagai hal, mulai dari penggunaan aplikasi keuangan desa hingga pelatihan perangkat desa dalam menjalankan sistem tersebut. Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah salah satu dari banyak aplikasi yang diberikan pemerintah yang berbasis SIA dan dimaksudkan untuk membantu desa dalam mengelola keuangan mereka dan menyusun laporan yang sesuai dengan peraturan (BPKP, 2020). Tujuan penggunaan sistem ini adalah untuk mengurangi kemungkinan kesalahan manusia dalam pencatatan manual dan memastikan bahwa semua transaksi yang terjadi di desa dicatat dengan baik. Selain itu, perangkat desa harus berkomitmen untuk menerapkan SIA dan memahami prosedur pelaporan yang sesuai untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan desa.<sup>7</sup>

Berdasarkan observasi awal, pemerintah Desa Polewali di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang menggunakan sistem keuangan desa (Siskeudes). Ada beberapa masalah dalam penggunaan aplikasi tersebut. Beberapa masalah termasuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi, terutama dalam hal pemanfaatan SDM di tingkat desa. Kadang-kadang terjadi kesalahan sistem, seperti saat data dimasukkan atau proses pencetakan laporan, serta kekeliruan dalam proses input dan pelaporan anggaran. Pembaruan (*update*) aplikasi siskeudes juga bisa menyebabkan perubahan format yang membingungkan pengguna sehingga menghambat proses penginputan. Aplikasi tersebut mendukung pengelolaan keuangan desa khususnya pada tahap penatausahaan. Siskeudes merupakan perangkat teknologi yang ditujukan untuk

---

<sup>7</sup> Supardi R, "Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa.," *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 2021.

meningkatkan pengelolaan administrasi dan keuangan di tingkat desa, yang berfungsi sebagai alat bantu bagi pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa.<sup>8</sup>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah undang-undang utama yang mengatur penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan peraturan menteri dalam negeri lainnya juga mengatur pengelolaan keuangan desa dan penggunaan Siskeudes.<sup>9</sup>

meskipun telah banyak penelitian yang membahas sistem informasi keuangan desa, sebagian besar masih berfokus pada aspek regulasi dan implementasi teknis secara umum. Masih sedikit kajian yang secara mendalam menelaah efektivitas nyata penerapan SIA dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, khususnya dalam konteks sosial dan kapasitas kelembagaan desa itu sendiri. Gap inilah yang menjadi alasan pentingnya dilakukan penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis bagaimana peran Sistem Informasi Akuntansi, khususnya melalui penggunaan Siskeudes, dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Polewali. Dengan menggali praktik dan tantangan yang dihadapi di lapangan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata baik secara akademis maupun praktis, terutama dalam merumuskan rekomendasi untuk mengoptimalkan tata kelola keuangan desa yang lebih terbuka, tertib, dan bertanggung jawab.

---

<sup>8</sup> Fuad Khoirul et Al, *An Analysis in the Application of the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (Utaut) Model on Village Fund System (SISKEUDES) with Islamic Work Ethics as a Moderating Effect* (Lecture Notes in Networks and Systems, 2021).

<sup>9</sup> “Pemerintah Indonesia.2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Pemerintah Nomor 43.,” n.d.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengusulkan rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana sistem informasi akuntansi yang digunakan di Desa Polewali Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana peran sistem informasi akuntansi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Polewali, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang?
3. bagaimana penerapan prinsip akuntansi syariah pada sistem informasi akuntansi yang digunakan di Desa Polewali Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini dilakukan yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan sistem informasi akuntansi yang digunakan di Desa Polewali Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mendeskripsikan peran sistem informasi akuntansi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Polewali, Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.
3. Untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan prinsip akuntansi syariah pada sistem informasi akuntansi yang digunakan di Desa Polewali Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang .

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini dapat dibagi menjadi dua bagian yakni: kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

##### **1. Kegunaan teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, bahan informasi, dan bahan referensi terkait peran sistem informasi akuntansi terhadap transparansi dan akuntabilitas dana desa khususnya di lembaga pemerintahan desa. Juga merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar S1 pada Institut Agama Islam Negeri Parepare.

##### **2. Kegunaan Praktis**

###### **a. Bagi Institut Agama Islam Negeri Parepare**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi IAIN Parepare khususnya fakultas ekonomi dan bisnis islam untuk memberikan referensi maupun informasi yang berhubungan dengan apa yang diteliti.

###### **b. Bagi Mahasiswa**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan menambah wawasan, memberikan sumbangan pemikiran mengenai system informasi akuntansi pada pemerintahan desa yang dapat digunakan untuk melaksanakan kajian dan penelitian selanjutnya.

###### **c. Bagi Peneliti**

Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dalam melakukan penulisan, analisis penelitian, dan permasalahan yang terkait dengan apa yang diteliti. Sekaligus sebagai bahan perbandingan teori yang diperoleh di perguruan tinggi dengan kondisi di lapangan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian-penelitian sebelumnya menjadi rujukan penting bagi penulis dalam menyusun penelitian ini, sehingga mampu memperluas pemahaman teoritis. Adapun beberapa karya ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini antara lain:

*Pertama*, dalam penelitian yang dilakukan oleh Alfina yang berjudul “Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Apbdes Pemerintah Desa Kadingeh Kabupaten Enrekang (Analisis Akuntansi Syariah)”. Dalam studi ini dijelaskan bahwa Pemerintah Desa Kadingeh telah memanfaatkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sebagai media sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan keuangan desa. Penggunaan aplikasi ini mempermudah dalam proses penganggaran dan penatausahaan APBDes. Sistem yang diterapkan juga telah diselaraskan dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah, seperti nilai keadilan, kebenaran, dan akuntabilitas. Selain itu, partisipasi masyarakat dijalankan melalui musyawarah dan penyampaian aspirasi dalam tahap perencanaan hingga pengelolaan, sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi pengelolaan anggaran desa.<sup>10</sup>

Penelitian ini memiliki sejumlah kesamaan dengan studi yang dilakukan oleh Alfina, di mana keduanya sama-sama menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sebagai sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan keuangan desa. Penggunaan aplikasi ini dinilai sangat membantu dalam proses penganggaran,

---

<sup>10</sup> Alfina, “Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan APBDes Pemerintah Desa Kadingeh Kabupaten Enrekang (Analisis Akuntansi Syariah)” (Parepare, 2022).

pencatatan, dan pelaporan keuangan secara lebih efektif dan efisien. Kedua desa dalam pengelolaan keuangannya telah diselaraskan dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah seperti keadilan, akuntabilitas, dan transparansi. Meskipun demikian, terdapat perbedaan signifikan antara kedua penelitian. Dalam penelitian di Desa Polewali, transparansi informasi keuangan kepada masyarakat dinilai masih terbatas, di mana informasi hanya disampaikan secara umum melalui rapat desa atau papan informasi dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Sebaliknya, dalam penelitian Alfina, transparansi tampak lebih terstruktur dengan adanya partisipasi aktif masyarakat dari tahap perencanaan hingga pengelolaan anggaran, menunjukkan komitmen yang lebih kuat terhadap keterbukaan informasi.

*Kedua*, dalam penelitian yang dilakukan oleh Kaharuddin yang berjudul “Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Keuangan Pada Pemerintah Desa Paladang Kabupaten Enrekang”. Pelaksanaan sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan keuangan di Pemerintah Desa Paladang sudah berjalan cukup baik dan mengikuti regulasi serta pedoman yang berlaku. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan, khususnya dalam hal keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang belum sepenuhnya memahami penggunaan sistem akuntansi dan prosedur pencatatan keuangan desa.<sup>11</sup>

Penelitian yang penulis lakukan memiliki kesamaan dengan studi yang dikerjakan oleh Kaharuddin, khususnya dalam hal pembahasan mengenai penggunaan sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan keuangan desa yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Meskipun demikian, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara keduanya. terletak pada kesiapan sumber daya manusia

---

<sup>11</sup> Kaharuddin, “Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Keuangan Pada Pemerintah Desa Paladang Kabupaten Enrekang” (Makassar, 2017).

(SDM). Di Desa Polewali, penggunaan aplikasi Siskeudes telah berjalan dengan baik dan dinilai sangat membantu proses pencatatan dan pelaporan keuangan, tanpa hambatan berarti. Sementara itu, di Desa Paladang, pelaksanaan sistem informasi akuntansi masih menghadapi kendala pada aspek SDM, di mana aparat desa belum sepenuhnya memahami cara kerja sistem dan prosedur pencatatan yang benar. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada sistem yang digunakan, tetapi juga pada kesiapan dan kapasitas pengelola keuangan desa.

*Ketiga*, dalam penelitian yang dilakukan oleh Riska Yanti yang berjudul “Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan laporan keuangan Desa Polewali Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang (Perspektif Akuntansi Syariah)”. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa pengelolaan laporan keuangan dana desa di Desa Polewali, Kabupaten Pinrang, dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi Siskeudes serta didukung oleh pencatatan manual. Transparansi diwujudkan melalui publikasi laporan keuangan tahunan dalam bentuk baliho yang dipasang di area publik. Sementara itu, akuntabilitas tercermin dari capaian realisasi anggaran yang terealisasi secara optimal, yang terlihat dari keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan. Secara keseluruhan, pengelolaan dana desa di Desa Polewali telah mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, penerapannya juga sejalan dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah, seperti tanggung jawab, keadilan, dan kebenaran.<sup>12</sup>

Penelitian yang penulis lakukan memiliki sejumlah kesamaan dengan studi yang dilakukan oleh Riska Yanti, terutama dalam hal pembahasan mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Polewali, Kecamatan

---

<sup>12</sup> Riska Yanti, *Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan Desa Polewali Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang (Perspektif Akuntansi Syariah)* (Parepare, 2024).

Suppa, Kabupaten Pinrang. Kedua penelitian ini sama-sama mengulas sistem pengelolaan keuangan yang diterapkan, yaitu kombinasi antara aplikasi Siskeudes dan pencatatan manual, serta bentuk transparansi yang ditunjukkan melalui publikasi baliho dan realisasi anggaran dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Meski memiliki objek kajian yang sama, terdapat perbedaan pendekatan antara penelitian ini dan penelitian Riska Yanti. Riska Yanti lebih menitikberatkan pada analisis pengelolaan dana desa melalui sudut pandang akuntansi syariah, dengan fokus pada nilai-nilai pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran. Sementara itu, penelitian penulis menekankan peran sistem informasi akuntansi sebagai sarana untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga lebih menyoroti aspek teknologi dalam proses pengelolaan keuangan desa. Perbedaan ini mencerminkan adanya keragaman dalam melihat dan memahami upaya tata kelola dana desa yang akuntabel dan transparan.

*Keempat*, dalam penelitian yang dilakukan oleh Nova Arghresy yang berjudul “Analisis Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Kanawatu Kabupaten Luwu Timur Di tengah Pandemi Covid-19”. Proses pelaporan pertanggungjawaban atau akuntabilitas atas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kanawatu telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Desa Kanawatu menggunakan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) berbasis teknologi informasi dalam menyusun laporan keuangan, melalui aplikasi resmi yang disediakan pemerintah. Desa juga diwajibkan untuk menyampaikan

laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa secara sistematis dan terbuka.<sup>13</sup>

Penelitian yang penulis lakukan memiliki sejumlah kesamaan dengan studi yang dilakukan oleh Nova Arghresy, terutama dalam mengulas peran sistem informasi akuntansi dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Keduanya juga menekankan pentingnya penerapan sistem informasi akuntansi sebagai alat pendukung transparansi dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban dana desa.

Meski membahas tema yang serupa, terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara kedua penelitian. Penelitian ini berfokus pada pengelolaan dana desa secara umum di Desa Polewali, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, tanpa mengangkat konteks tertentu secara spesifik. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Nova Arghresy lebih memfokuskan pada akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Kanawatu, Kabupaten Luwu Timur, dengan perhatian khusus terhadap kondisi pandemi COVID-19. Nova menyoroti bagaimana situasi pandemi berdampak pada mekanisme pengelolaan dana desa, termasuk penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) yang disesuaikan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya penanganan pandemi.

*Kelima*, penelitian yang dilakukan oleh Aditia Mandela dengan judul “Analisis Sistem Informasi Akuntansi Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Desa Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus)” menunjukkan bahwa tahapan perencanaan dan pelaporan pertanggungjawaban

---

<sup>13</sup> Nova Arghresy, “Analisis Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Kanawatu Kabupaten Luwu Timur Di Tengah Pandemi Covid-19” (Makassar: Universitas Bosowa, 2021).

keuangan desa di Desa Sukaraja telah dilaksanakan secara baik dan sesuai hasil kesepakatan dalam forum musyawarah. Sejumlah kegiatan pembangunan, seperti rehabilitasi jalan, telah direalisasikan. Meski demikian, masih terdapat hambatan dalam proses pelaporan dan pengelolaan, yang sebagian besar disebabkan oleh kendala jaringan komunikasi serta adanya perbedaan pandangan antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten. Dilihat dari perspektif ekonomi Islam, pengelolaan dana desa di wilayah tersebut telah mencerminkan prinsip-prinsip syariah, karena berorientasi pada pencapaian ridha Allah dan tidak menyimpang dari nilai-nilai Islam.<sup>14</sup>

Penelitian ini memiliki kemiripan dengan studi yang dilakukan oleh Aditia Mandela, terutama dalam hal pembahasan mengenai sistem informasi akuntansi sebagai instrumen untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Keduanya juga mengulas tahapan perencanaan hingga pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa.

Meski demikian, terdapat sejumlah perbedaan yang cukup mencolok antara kedua penelitian tersebut. Penelitian ini lebih memusatkan perhatian pada fungsi sistem informasi akuntansi dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa secara umum. Sebaliknya, studi Aditia Mandela secara khusus menelaah alokasi dana desa dari sudut pandang ekonomi Islam. Dalam penelitiannya, Aditia turut mengulas tahapan perencanaan serta hambatan yang muncul dalam pengelolaan, seperti perbedaan persepsi antara pemerintah desa dan kabupaten, serta kendala teknis seperti gangguan jaringan komunikasi.

---

<sup>14</sup> Aditia mandela, “Analisis Sistem Informasi Akuntansi Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Desa Sukaraja Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)” (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

## B. Tinjauan Teoritis

### 1. Sistem Informasi Akuntansi

#### a. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Ardana dan Hendro, Sistem Informasi Akuntansi adalah suatu perangkat sistematis yang dibuat untuk menghimpun, mencatat, dan mengelola data yang berkaitan dengan transaksi keuangan maupun data non-keuangan. Sistem ini bertujuan untuk menyajikan informasi yang berguna dan relevan sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.<sup>15</sup>

Menurut Kieso, et al., Sistem Informasi Akuntansi berperan sebagai suatu mekanisme yang bertugas menghimpun dan mengolah data transaksi, lalu menghasilkan informasi keuangan yang bernilai guna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.<sup>16</sup>

Sedangkan menurut Krismiaji, bahwa Sistem Informasi Akuntansi merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk mengolah data serta transaksi, dengan tujuan menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi proses perencanaan, pengendalian, dan pelaksanaan kegiatan bisnis. Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi mencakup seluruh informasi yang berkaitan dengan transaksi, baik yang bersifat finansial maupun non-finansial, yang disusun sesuai dengan kebutuhan pengguna dalam suatu entitas, guna mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan efektif.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> I Cenik Ardana and Hendro Lukman, *Sistem Informasi Akuntansi*, 1st ed. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016).

<sup>16</sup> Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, and Terry D. Warfield, *Intermediate Accounting: IFRS Edition*, ed. John Wiley & Sons, 21st ed., 2010.

<sup>17</sup> Krismiaji, *Sistem Informasi Akuntansi (Edisi Keempat)* (UPP-STIM YKPN, 2015).

Menurut indrayani, Sistem Informasi Akuntansi adalah rangkaian sistem yang terintegrasi dengan *software* dan akuntansi sehingga membentuk rangkaian dalam suatu program atau *software*, untuk lebih jelas dan detail.<sup>18</sup>

Selain berfungsi sebagai penyedia data yang relevan, Sistem Informasi Akuntansi juga memiliki peran penting dalam melindungi aset organisasi. Oleh karena itu, perancangannya perlu mempertimbangkan aspek efisiensi biaya agar sistem dapat diimplementasikan dengan pengeluaran seminimal mungkin. Secara keseluruhan, Sistem Informasi Akuntansi mencakup lima subsistem utama yang saling berhubungan dan berperan dalam mendukung aktivitas operasional maupun manajerial sebuah entitas, yaitu:

1) Sistem pengeluaran (*expenditure system*).

Rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan perolehan sumber daya ekonomi yang diperlukan organisasi untuk menunjang kelangsungan operasional serta mendukung aktivitas usaha secara keseluruhan.

2) Sistem pendapatan (*revenue system*).

Bagian dari Sistem Informasi Akuntansi yang berfokus pada proses penjualan barang atau jasa kepada pelanggan, termasuk pencatatan transaksi dan penerimaan pembayaran dari hasil penjualan tersebut.

3) Sistem produksi (*production system*).

Mengacu pada sistem yang mengelola pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan sumber daya ekonomi dalam rangka menjalankan proses produksi guna mendukung kegiatan inti perusahaan.

4) Sistem manajemen sumber daya (*resources management system*).

---

<sup>18</sup> Indrayani, *Modul Sistem Informasi Akuntansi* (IAIN Parepare, 2022).



Sistem yang mencakup aktivitas pengelolaan dan pengawasan terhadap penggunaan sumber daya dalam organisasi agar dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif sesuai tujuan manajerial.

- 5) Sistem buku besar dan laporan keuangan (*general ledger and financial accounting*).

Sistem yang bertugas memproses data dari transaksi keuangan menjadi informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan, yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangan suatu entitas.<sup>19</sup>

b. Tujuan Sistem Informasi Akuntansi

Sistem Informasi Akuntansi dirancang dengan tujuan utama untuk menyajikan informasi akuntansi yang relevan dan bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan, baik dari kalangan internal organisasi maupun pihak eksternal. Adapun manfaat atau fungsi dari sistem ini mencakup beberapa hal berikut:

- 1) Menjaga keamanan aset perusahaan, seperti kas, inventaris barang, maupun aset tetap, dari potensi penyalahgunaan atau kehilangan.
- 2) Menyediakan data yang mendukung proses pengambilan keputusan, misalnya informasi mengenai produk dengan tingkat permintaan tertinggi dalam kegiatan usaha ritel.
- 3) Menyampaikan informasi penting kepada pihak eksternal yang memiliki kepentingan terhadap organisasi, seperti investor, kreditur, dan regulator.
- 4) Menyajikan informasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pegawai maupun unit kerja tertentu di dalam perusahaan.

---

<sup>19</sup> Mulyadi, *Sistem Akuntansi, Edisi 4* (Penerbit Salemba, 2023).

- 5) Menyimpan catatan keuangan historis yang dapat dijadikan acuan dalam proses audit dan pemeriksaan keuangan di masa mendatang.
- 6) Mendukung proses penyusunan dan penilaian terhadap anggaran, agar alokasi sumber daya lebih tepat dan efisien.
- 7) Memberikan informasi yang diperlukan dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian operasional, guna meningkatkan efektivitas manajemen dalam menjalankan strategi bisnis.<sup>20</sup>
- 8) Salah satu peran penting dari Sistem Informasi Akuntansi adalah mengelola aktivitas transaksi bisnis dengan cara yang lebih efisien dan terstruktur. Dalam sistem konvensional, pencatatan dilakukan secara manual melalui jurnal dan buku besar yang disimpan dalam bentuk dokumen fisik. Sebaliknya, pada sistem berbasis teknologi, data transaksi dimasukkan ke dalam aplikasi atau perangkat lunak akuntansi dan disimpan secara digital dalam bentuk file atau database. Tahapan dalam pengolahan data ini bertujuan untuk menghasilkan informasi yang akurat dan relevan, yang kemudian digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Keseluruhan proses ini dikenal sebagai siklus pemrosesan data.

Menurut Romney dan Steinbart, Tujuan Sistem Informasi Akuntansi ada tiga yaitu :

- 1) Mendukung fungsi manajerial organisasi, karena manajemen memiliki tanggung jawab untuk mengelola serta mengomunikasikan pemanfaatan sumber daya organisasi secara efisien guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

---

<sup>20</sup> Anastasia Dania and Lilies Setiawati, *Sistem Informasi Akuntansi: Perencanaan, Proses, Dan Penerapan* (yogyakarta: C.V Andi Offset, 2011).

- 2) Menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga sistem ini membantu manajemen dalam menjalankan peran strategisnya melalui penyajian data yang relevan dan akurat.
- 3) Mendukung pelaksanaan operasional harian organisasi, dengan memastikan bahwa informasi dan proses yang dibutuhkan untuk kegiatan rutin dapat diakses dan digunakan secara efektif.

c. Komponen Sistem Informasi

Sistem informasi akuntansi terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu:

- 1) Sumber daya manusia, yakni individu yang terlibat dalam pengoperasian dan pemanfaatan sistem untuk mendukung berbagai aktivitas organisasi.
- 2) Prosedur dan instruksi kerja, berupa langkah-langkah operasional yang digunakan dalam proses pengumpulan, pengolahan, serta penyimpanan data yang berkaitan dengan kegiatan organisasi.
- 3) Data, yang merepresentasikan informasi penting mengenai aktivitas usaha dan kondisi organisasi secara keseluruhan.
- 4) Aplikasi atau perangkat lunak, sebagai alat bantu dalam mengelola, mengakses, dan memproses data secara efisien dan akurat data.
- 5) Infrastruktur teknologi, mencakup perangkat keras seperti komputer, alat pendukung lainnya, serta jaringan komunikasi yang menunjang kelancaran sistem informasi akuntansi.
- 6) Sistem pengendalian internal dan keamanan, yaitu mekanisme perlindungan yang dirancang untuk menjaga integritas, keakuratan, dan kerahasiaan data dalam sistem informasi akuntansi.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Marshall B. Romney and Paul John Steinbart, *Sistem Informasi Akuntansi = Accounting Information Systems*, 13th ed. (Salemba Empat, 2015).

Setelah memahami berbagai komponen yang membentuk Sistem Informasi Akuntansi, dapat dikenali beberapa fungsi utamanya, antara lain:

- 1) Mencatat dan menyimpan data terkait aktivitas organisasi, termasuk penggunaan sumber daya serta keterlibatan personel. Hal ini penting mengingat organisasi menjalankan proses bisnis berulang, seperti transaksi penjualan maupun pembelian bahan baku.
- 2) Mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat, sehingga manajemen dapat menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap aktivitas serta sumber daya yang dimiliki organisasi.
- 3) Menyediakan sistem pengendalian internal yang efektif, guna menjaga keamanan dan integritas aset serta data milik organisasi atau perusahaan.<sup>22</sup>

d. Indikator Sistem Informasi Akuntansi

Beberapa faktor yang menjadi tolok ukur dalam menilai kualitas suatu sistem informasi akuntansi antara lain:

- 1) Kemampuan Beradaptasi (*Adaptability*) adalah Sistem yang berkualitas perlu mampu menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang terjadi dalam lingkungan organisasi. Fleksibilitas sistem ini meliputi kemampuan untuk menanggapi perkembangan kebutuhan pengguna, serta kemudahan dalam pengoperasian dan akses oleh pihak terkait.

---

<sup>22</sup> Romney and Steinbart.

- 2) Ketersediaan (*Availability*) adalah Sistem informasi harus selalu dapat diakses dan digunakan sesuai dengan standar layanan yang telah ditentukan, misalnya dalam perjanjian tingkat layanan (*Service Level Agreement*), guna memastikan bahwa pengguna dapat memperoleh informasi secara konsisten tanpa gangguan.
- 3) Keandalan (*Reliability*) adalah Sistem yang andal mampu beroperasi secara stabil meskipun dalam kondisi yang tidak ideal, seperti adanya gangguan teknis atau kesalahan. Keandalan ini penting untuk menjamin kelangsungan operasional tanpa hambatan berarti..
- 4) Kecepatan Respons (*Response Time*) adalah Mengacu pada seberapa cepat sistem merespons permintaan atau perintah pengguna, indikator ini menekankan pentingnya penyediaan informasi secara tepat waktu agar proses pengambilan keputusan dapat berjalan secara efisien dan efektif.
- 5) Kemudahan Penggunaan (*Usability*) adalah Menggambarkan tingkat kemudahan sistem untuk digunakan oleh pengguna, baik dalam memahami fungsi-fungsi sistem, melakukan input data, maupun dalam membaca dan menginterpretasikan hasil keluaran yang ditampilkan.<sup>23</sup>

## 2. Akuntabilitas

Webster mendefinisikan akuntabilitas adalah suatu keadaan di mana seseorang atau suatu entitas memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakan, keputusan, serta kewenangan yang dimilikinya. Istilah “*akuntabel*” mengandung beberapa pengertian penting. *Pertama*, menunjukkan bahwa individu atau lembaga memiliki tanggung jawab secara moral maupun struktural untuk memberikan

---

<sup>23</sup> Delone and Mclean, *Information Systems Success: The Quest for the Dependent Variabel* (Information System Research, 2003).

laporan kepada pihak yang lebih tinggi, sebagaimana manusia wajib mempertanggungjawabkan amalnya kepada Tuhan. *Kedua*, menggambarkan adanya kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban secara terbuka dan tegas. *Ketiga*, menunjukkan bahwa suatu tindakan atau kebijakan dapat dinilai, diaudit, dan dipertanggungjawabkan secara terstruktur dan objektif.

Alinea keempat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung nilai-nilai fundamental yang berkaitan dengan dasar pembentukan pemerintahan Indonesia. Bagian ini menjadi landasan normatif dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah. Prinsip akuntabilitas publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan menjadi elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan berintegritas.

Dalam pengelolaan keuangan, pihak penyelenggara pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan segala tindakannya kepada masyarakat luas. Beberapa pakar turut memberikan pandangannya mengenai hal ini. Misalnya, Hasniati menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan tanggung jawab yang melekat pada aparatur pemerintah desa dalam hal pengelolaan Dana Desa, di mana setiap proses harus diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan ekonomis.<sup>24</sup>

Menurut Mardiasmo, akuntabilitas adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pihak yang diberi amanah, dengan cara menjelaskan, melaporkan, dan membuka secara transparan seluruh aktivitas yang dilakukan dalam rangka

---

<sup>24</sup> Hasniati, "Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," *Jurnal Analisis Dan Pelayanan Publik* 2, no. 1 (2016).

penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat selaku pihak yang memberikan amanah.<sup>25</sup>

Berdasarkan pandangan dari sejumlah ahli, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan bentuk tanggung jawab yang diwujudkan melalui penyampaian laporan dan penjelasan atas setiap tindakan dan hasil kinerja yang dilakukan oleh individu, lembaga, maupun pimpinan kepada pihak yang berwenang dan berhak untuk mengetahui, baik dari sisi teknis maupun administratif. Mengacu pada pemahaman tersebut, maka setiap level pemerintahan baik pusat, daerah, maupun desa—dituntut untuk memahami secara jelas batasan serta cakupan akuntabilitas sesuai dengan peran dan fungsi yang dimilikinya. Penekanan pada akuntabilitas ini tidak hanya terbatas pada capaian positif atau keberhasilan program, tetapi juga mencakup pengakuan atas kegagalan atau ketidaktercapaian dalam pelaksanaan tugas oleh instansi terkait..

a) Akuntabilitas Pemerintahan

Mardiasmo menyebutkan bahwa akuntabilitas suatu pemerintahan dibagi ke dalam 4 kelompok:

- 1) Mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku, termasuk hukum positif, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan administratif yang ditetapkan.
- 2) Pengelolaan sumber daya keuangan yang dimiliki secara transparan dan akuntabel.
- 3) Menjalankan kegiatan secara efisien, efektif, dan hemat biaya, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

---

<sup>25</sup> Mardiasmo, "Perwujudan Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik, Suatu Sasaran Good Governance," *Jurnal Akuntansi Sektor Pemerintahan* 2 (2006).

- 4) Pencapaian hasil program dan kegiatan pemerintah yang selaras dengan tujuan yang direncanakan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

b) Karakteristik Akuntabilitas

Dari sudut pandang akuntabilitas, terdapat sejumlah ciri utama yang menandai sistem akuntabilitas yang baik, di antaranya:

- 1) Berorientasi pada pencapaian hasil kerja yang optimal.
- 2) Menerapkan indikator atau ukuran tertentu dalam menilai kinerja yang dicapai.
- 3) Menyediakan informasi yang relevan dan berkualitas sebagai dasar pertimbangan bagi pengambil kebijakan.
- 4) Menghasilkan data dari waktu ke waktu.
- 5) Menyampaikan laporan hasil secara transparan dan berkala.<sup>26</sup>

c) Dimensi Akuntabilitas

Akuntabilitas yang harus diterapkan dalam organisasi pemerintahan terdiri atas beberapa dimensi. Menurut Rasul terdapat 5 dimensi, yaitu:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Jenis akuntabilitas ini mencakup kepatuhan pemerintah terhadap seluruh aturan hukum yang berlaku, baik yang bersifat nasional maupun internal kelembagaan. Tujuannya adalah untuk memperkuat penegakan hukum dalam tata kelola pemerintahan. Sementara itu, aspek kejujuran dalam akuntabilitas menekankan pentingnya pencegahan terhadap penyimpangan wewenang dan pengelolaan keuangan publik, seperti praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

---

<sup>26</sup> Mardiasmo. (2006)



Implementasi prinsip ini akan mendorong terciptanya institusi publik yang transparan dan bermoral.

## 2. Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas kinerja mengacu pada tanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang harus dilakukan secara efektif dan efisien. Pemerintah diharapkan mampu menunjukkan hasil nyata dari pelayanannya serta mengelola sumber daya dengan optimal.

## 3. Akuntabilitas Program

Jenis ini berkaitan dengan tanggung jawab untuk menjamin bahwa program-program yang dirancang benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan program juga harus mencerminkan mutu yang tinggi serta konsisten dengan visi, misi, dan tujuan organisasi atau instansi pelaksana.

## 4. Akuntabilitas Kebijakan

Pembuatan dan penerapan kebijakan oleh instansi pemerintah harus didasarkan pada pertimbangan terhadap dampak, urgensi, serta alasan rasional dari kebijakan tersebut. Tujuan kebijakan perlu dijelaskan secara jelas agar masyarakat memahami manfaat yang akan diperoleh.

## 5. Akuntabilitas Finansial

Merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana publik secara hemat dan tepat sasaran. Instansi pemerintah wajib menyusun laporan

keuangan yang menggambarkan kinerja fiskal secara akurat dan sesuai dengan prinsip-prinsip efisiensi serta efektivitas.<sup>27</sup>

### 3. Transparansi

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, transparansi diartikan sebagai penyediaan informasi keuangan yang disampaikan secara terbuka dan jujur kepada publik. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara luas dan mendalam mengenai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya, serta sejauh mana kepatuhan pemerintah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Transparansi adalah prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan keterbukaan informasi kepada masyarakat, mulai dari tahap penyusunan kebijakan, proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan, hingga mekanisme pengawasan dan pengendalian. Tujuannya adalah agar informasi yang berkaitan dengan jalannya pemerintahan dapat diakses dengan mudah oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Transparansi juga mencerminkan komitmen lembaga publik untuk bersikap terbuka dalam menyampaikan pengelolaan sumber daya publik kepada para *stakeholder*. Prinsip ini berlandaskan pada hak publik atas informasi, sehingga seluruh proses yang melibatkan institusi pemerintah harus terbuka dan mudah dipantau. Selain itu, informasi yang disediakan harus cukup jelas dan memadai agar publik dapat memahaminya, mengevaluasi, serta melakukan pengawasan secara efektif.

---

<sup>27</sup> Sjahrudin Rasul, *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Dan Anggaran Dalam Perspektif UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara* (Perum Percetakan Negara, Republik Indonesia, 2003).

Untuk mencapai transparansi, organisasi harus memberikan informasi terkait kegiatan dan tata kelola kepada para pemangku kepentingan yang akurat, lengkap dan tersedia secara tepat waktu. Ini tidak berarti semua informasi harus tersedia untuk umum.<sup>28</sup>

Beberapa manfaat penting dengan adanya transparansi anggaran menurut Andrianto yaitu :

- a. Mencegah terjadinya praktik korupsi, karena setiap proses anggaran dapat diawasi secara terbuka oleh publik.
- b. Mempermudah dalam mengidentifikasi kekuatan maupun kelemahan dari suatu kebijakan, sehingga memungkinkan evaluasi yang lebih objektif.
- c. Meningkatkan akuntabilitas lembaga pemerintah, di mana masyarakat dapat lebih mudah menilai sejauh mana kinerja pemerintah dalam melaksanakan tugasnya.
- d. Mendorong tumbuhnya kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam menetapkan kebijakan, karena proses pengambilan keputusan bersifat terbuka.
- e. Memperkuat rasa kepercayaan sosial, sebab keterbukaan anggaran mendorong munculnya hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat.

Transparansi memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan berbagai fungsi pemerintahan, terutama dalam menunaikan amanah yang dipercayakan oleh rakyat. Karena pemerintah diberi kuasa untuk membuat

---

<sup>28</sup> Andi Ayu Frihatni, Nirwana, and Syamsuddin, "Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Parepare," *Ekonomi Dan Bisnis* 4 (2021).

keputusan yang berpengaruh luas terhadap kehidupan masyarakat, maka menjadi keharusan bagi pemerintah untuk menyampaikan informasi yang lengkap dan jelas terkait seluruh kebijakan serta kegiatan yang dilakukannya. Dalam hal ini, transparansi berperan sebagai alat kontrol yang efektif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan, khususnya dalam aspek pengelolaan keuangan negara, sehingga dapat menjaga dana publik dari tindakan yang menyimpang atau melanggar aturan. Prinsip-Prinsip Transparansi.

Prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa diharapkan dapat memenuhi beberapa unsur yaitu.

a. Prinsip-Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa harus memenuhi beberapa unsur yaitu:

- a) Keterbukaan akses untuk masyarakat dan para pemangku kepentingan harus diberikan kesempatan yang luas untuk ikut serta dalam proses perencanaan, penyusunan, hingga pelaksanaan anggaran desa.
- b) Informasi dapat diakses publik Informasi mengenai kondisi keuangan desa harus disampaikan secara terbuka, mudah diakses, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial atau ekonomi.
- c) Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan Proses penyusunan anggaran, khususnya dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), harus melibatkan masyarakat sebagai bagian dari pengambilan keputusan.

d) Penyerapan aspirasi warga Pemerintah desa perlu menampung dan mengolah berbagai gagasan serta masukan dari masyarakat untuk dijadikan dasar dalam menetapkan kebijakan atau keputusan desa.<sup>29</sup>

b. Indikator Transparansi

Sedangkan menurut Krina indikator-indikator dari transparansi adalah sebagai berikut :

- a) Tersedianya informasi yang dapat dipahami dengan mudah dan tidak menimbulkan ambiguitas.
- b) Kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi yang relevan, tanpa hambatan administratif maupun teknis
- c) Adanya sistem pengaduan yang terstruktur, sebagai sarana untuk melaporkan pelanggaran peraturan atau permintaan pungutan liar, termasuk praktik suap.
- d) Penguatan arus informasi publik melalui kolaborasi aktif dengan media massa serta organisasi masyarakat sipil atau lembaga non-pemerintah.

Dengan merujuk pada berbagai indikator yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa transparansi berperan sebagai alat penting untuk memenuhi hak masyarakat dalam mengakses informasi serta memahami proses penyelenggaraan pemerintahan di lingkungannya. Melalui keterbukaan informasi, transparansi mendorong keterlibatan publik dan mempererat hubungan antara pemerintah dengan warganya.

Berdasarkan penjelasan Krina di atas, dapat dipahami bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat mengenai proses penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya,

---

<sup>29</sup> Nico Andrianto, *Good E-Government : Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government* (Malang: Bayumedia, 2007).

dengan menerapkan prinsip transparansi, terutama melalui penyajian laporan-laporan atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Di samping itu, pemerintah juga penting untuk memfasilitasi wadah bagi masyarakat dalam menyampaikan masukan atau pendapat, sehingga terbentuk sistem partisipatif yang memungkinkan warga berperan aktif dalam mengawasi dan mengontrol pelaksanaan pemerintahan desa secara langsung dan berkesinambungan.<sup>30</sup>

Transparansi merupakan keterbukaan oleh pemerintah dalam menyampaikan sebuah informasi mengenai pengelolaan dana dan sumber daya publik kepada pihak yang berhak mendapatkan informasi tersebut.<sup>31</sup> Dalam hal ini, masyarakat merupakan pihak yang memiliki hak utama untuk memperoleh informasi, karena mereka memiliki hak dasar untuk mengetahui sejauh mana anggaran yang dikelola oleh pemerintah telah digunakan secara efektif, terutama dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama.

Transparansi dapat diartikan sebagai sikap terbuka dari pemerintah dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran dan sumber daya publik kepada masyarakat atau pihak-pihak yang berhak untuk mengetahuinya. Transparansi adalah prinsip yang menjamin keterbukaan informasi bagi masyarakat, sehingga mereka memiliki akses terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan jalannya pemerintahan, mulai dari kebijakan yang ditetapkan, tahapan pelaksanaannya, hingga hasil atau pencapaian yang telah diperoleh oleh pemerintahan.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Krina P. Loina Lalolo, *Indikator & Alat Ukur Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi* (Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Bappenas., 2003).

<sup>31</sup> Mardiasmo, "Perwujudan Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik, Suatu Sasaran Good Governance."

<sup>32</sup> Lalolo, *Indikator & Alat Ukur Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*.

Transparansi perlu berlandaskan pada prinsip kebebasan informasi, di mana informasi yang disajikan harus dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkannya. Informasi tersebut harus disampaikan dengan lengkap, jelas, dan mudah dimengerti agar dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemantauan dan evaluasi. Jika dijalankan dengan baik, transparansi akan menciptakan mekanisme umpan balik yang positif antara pemerintah dan masyarakat, terutama melalui kemudahan akses terhadap informasi publik. Hal ini sangat penting karena informasi merupakan unsur utama yang memungkinkan masyarakat ikut berperan aktif dalam pengelolaan pemerintahan, khususnya pada tingkat desa.

c. Tujuan Transparansi

Menurut Mardiasmo, transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

- 1) Menjadi bentuk pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan dan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah.
- 2) Sebagai upaya untuk memperbaiki manajemen dalam pengelolaan.<sup>33</sup>

Transparansi menjadi salah satu aspek krusial dalam pelaksanaan pemerintahan yang bertugas menjalankan amanah rakyat. Hal ini penting karena seluruh keputusan strategis dipegang oleh pemerintah dan berdampak langsung pada masyarakat luas. Oleh sebab itu, pemerintah wajib menyampaikan informasi yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai segala aktivitas yang telah dilaksanakan. Dengan menerapkan transparansi, aliran dana baik dari sisi pendapatan maupun pengeluaran daerah dapat diungkap secara

---

<sup>33</sup> Mardiasmo, "Perwujudan Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik, Suatu Sasaran Good Governance."

terbuka, sehingga risiko penyalahgunaan anggaran bisa dikurangi bahkan dihilangkan sepenuhnya.<sup>34</sup>

#### **4. Dana Desa**

Desa merupakan sebuah entitas hukum masyarakat yang memiliki batas wilayah tertentu dan kewenangan untuk mengatur serta mengelola urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kepentingan warga setempat. Kewenangan ini didasarkan pada inisiatif masyarakat, hak asal-usul, maupun hak-hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, keuangan desa mencakup seluruh hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan nilai uang, termasuk segala aset berupa uang atau barang yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, keuangan desa mencakup seluruh hak dan kewajiban yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan desa yang dapat dinilai dalam bentuk uang, termasuk segala jenis kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Sumber keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pelaksanaan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa dibiayai melalui APBDesa, bantuan dari pemerintah pusat, dan bantuan dari pemerintah daerah. Sedangkan urusan pemerintahan daerah yang dijalankan oleh pemerintah desa didanai dari

---

<sup>34</sup> (Gunawan, 2016)



APBD, dan urusan pemerintahan pusat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dibiayai dari APBN.<sup>35</sup>

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta dilaksanakan secara tertib dan disiplin. Transparansi berarti pengelolaan dana dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik. Akuntabilitas merujuk pada tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara sah dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sementara itu, partisipasi mengindikasikan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan penyusunan anggaran desa. Selain itu, pengelolaan keuangan desa harus dilakukan melalui sistem pembukuan yang mengikuti prinsip-prinsip akuntansi keuangan pemerintah. Seluruh dana yang dipakai dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa merupakan bagian dari keuangan negara dan milik masyarakat, sehingga pengelolaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya:

- a. UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- b. PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- c. PP No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN d. Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Serta peraturan lain yang terkait, antara lain:

- a. UU Tentang Keterbukaan Informasi Publik

---

<sup>35</sup> Hanif Nurcholis, "HubuNurcholis, Hanif. 2011. 'Hubungan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Serta Peran Wakil Pemerintah.' Journal of Government and Politics 2.

- b. Peraturan yang diterbitkan oleh Menteri Desa.
- c. Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Secara historis, desa merupakan cikal bakal terbentuknya komunitas politik dan pemerintahan di Indonesia yang telah ada jauh sebelum negara-bangsa modern berdiri. Desa berperan sebagai lembaga otonom yang memiliki sistem tradisi, adat istiadat, dan hukum lokal yang khas serta mandiri. Keberagaman sosial dan budaya yang tinggi di setiap desa menjadikannya sebagai gambaran paling autentik dari keragaman bangsa Indonesia. Kewenangan desa meliputi hak-hak yang berasal dari asal-usulnya, kewenangan yang belum dialihkan kepada pemerintah daerah maupun pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan tugas pembantuan yang dipercayakan oleh pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten/kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Dana Desa yang berasal dari APBN memiliki filosofi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mewujudkan pemerataan pembangunan di desa. Dana ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, memajukan perekonomian desa, mengurangi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat posisi waga desa agar tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga berperan aktif sebagai subjek dalam proses pembangunan tersebut.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk desa melalui mekanisme transfer via APBD Kabupaten/Kota, yang difokuskan pada pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.

1. Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan pengelolaan keuangan desa meliputi beberapa tahap, diantaranya :

- a) Tahap Perencanaan
- b) Tahap Pelaksanaan
- c) Tahap Penatausahaan
- d) Tahap Pelaporan
- e) Tahap Pertanggungjawaban

## 2. Pengalokasian Dana Desa

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2020 Pasal 3 Tentang Tata Cara Penghitungan Pembagian Dana Desa ke Setiap Desa bahwa rincian dana desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

### a) Alokasi Dasar

Besaran Alokasi Dasar untuk setiap desa ditentukan dengan cara membagi total Alokasi Dasar Kabupaten dengan jumlah desa yang ada di wilayah kabupaten tersebut.

### b) Alokasi Afirmasi

Alokasi Afirmasi diberikan kepada desa-desa yang tergolong tertinggal dan sangat tertinggal, khususnya yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak dalam kelompok desa tersebut.

### c) Alokasi Kinerja

Alokasi Kinerja dialokasikan kepada desa yang menunjukkan performa terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, pencapaian keluaran Dana Desa, serta hasil pembangunan yang telah diraih.

d) Alokasi Formula

Besaran Alokasi Formula dihitung berdasarkan beberapa faktor, yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, dan kesulitan geografis, dengan data yang diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri.

## 5. Prinsip Akuntansi Syariah

Pengelolaan keuangan desa yang baik tidak hanya mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi konvensional, namun juga penting untuk mempertimbangkan nilai-nilai syariah, terutama dalam konteks masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Prinsip akuntansi syariah menekankan pada keadilan (*al-'adalah*), transparansi (*al-shafafiyah*), dan pertanggungjawaban (*mas'uliyah*) dalam setiap kegiatan pencatatan dan pelaporan keuangan.

Dalam substansinya, perkembangan akuntansi syariah di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari penyebaran ajaran Islam. Dalam prinsip syariah, pencatatan transaksi, baik yang dilakukan secara tunai maupun non-tunai, menjadi suatu kewajiban bagi umat muslim.<sup>36</sup> Prinsip pencatatan dalam setiap transaksi memiliki landasan kuat dalam ajaran Islam, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 282, Allah memerintahkan agar setiap transaksi ditulis secara jelas guna menjaga keadilan dan mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Ayat ini menunjukkan bahwa pencatatan bukan hanya aspek administratif, tetapi juga bagian dari amanah dan tanggung jawab moral.

dapat dilihat dari QS. Al-Baqarah 2/282 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بِكُمُ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ

<sup>36</sup> Anna Basriyani, Nova Zulfani Panggabean, and Alfansuri Tanjung, *Akuntansi Syariah: Konsep, Historis Dan Implementasi* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2023).

يَكْتَبُ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلَأِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلَأْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَلُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَسْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَانْقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kalian melakukan perjanjian utang piutang dengan jangka waktu tertentu, maka catatlah perjanjian tersebut. Seorang penulis di antara kalian harus mencatatnya dengan benar dan tidak boleh menolak untuk menulis sesuai dengan ilmu yang telah Allah ajarkan kepadanya. Hendaknya pihak yang berutang mendiktekan isi perjanjian dengan penuh ketakwaan kepada Allah, serta tidak mengurangi sedikit pun dari kewajibannya. Jika ia dalam kondisi kurang mampu, lemah akal, atau tidak dapat mendiktekan sendiri, maka walinya harus melakukannya dengan jujur. Persaksikanlah perjanjian tersebut dengan dua orang saksi laki-laki dari kalangan kalian. Jika tidak memungkinkan, maka satu laki-laki dan dua perempuan dapat menjadi saksi, sehingga jika salah satu dari mereka lupa, yang lain dapat mengingatkannya. Para saksi tidak boleh menolak ketika diminta menjadi saksi. Janganlah merasa enggan mencatat transaksi, baik yang nilainya kecil maupun besar, sesuai dengan jangka waktunya. Hal ini lebih adil di sisi Allah, lebih memperkuat bukti, dan mencegah keraguan di kemudian hari. Namun, jika transaksi yang dilakukan bersifat tunai, tidak ada kewajiban untuk mencatatnya. Meski demikian, tetaplah mengambil saksi saat melakukan transaksi jual beli. Janganlah penulis maupun saksi dipersulit dalam menjalankan tugasnya. Jika kalian melanggar aturan ini, itu merupakan perbuatan yang tidak benar. Bertakwalah kepada Allah, karena Dia memberikan pengajaran kepada kalian dan Maha Mengetahui segala sesuatu.”<sup>37</sup>

Dalam praktiknya, akuntansi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip fundamental yang bersumber dari ajaran Islam, sebagaimana tercermin dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 yang menekankan pentingnya pencatatan transaksi. Prinsip-prinsip ini menjadi karakteristik utama yang membedakan akuntansi syariah dari akuntansi konvensional, adapun prinsip-prinsip dasarnya, yaitu:

<sup>37</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, ed. Syamil Qur'an (Bandung, 2019).

a. Prinsip keadilan (*Al-'Adl*)

Prinsip keadilan dalam akuntansi syariah menuntut agar seluruh transaksi dan laporan keuangan disusun secara jujur, transparan, dan berimbang tanpa merugikan pihak mana pun.

b. Prinsip Pertanggungjawaban (*Mas'uliyah*)

Pertanggungjawaban merupakan prinsip fundamental dalam akuntansi syariah yang menekankan pentingnya akuntabilitas terhadap amanah pengelolaan harta dan sumber daya.

c. Prinsip Kebenaran (*Sidq*)

Kebenaran dalam akuntansi syariah berarti kejujuran dan keakuratan dalam penyajian informasi keuangan. Prinsip ini mengharuskan laporan yang disusun mencerminkan kondisi sebenarnya tanpa manipulasi atau penyembunyian informasi.<sup>38</sup>

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah menjadi langkah strategis untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Akuntansi syariah yang berlandaskan pada nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab, mendorong setiap aktivitas pencatatan dan pelaporan keuangan dilakukan secara terbuka, jujur, dan sesuai dengan prinsip syariah Islam.

Melalui sistem akuntansi syariah, setiap transaksi keuangan desa dapat dicatat secara rapi dan jelas, sehingga mudah diaudit dan diawasi oleh masyarakat maupun lembaga pengawas lainnya. Hal ini sejalan dengan prinsip

---

<sup>38</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2020).

transparansi, di mana informasi keuangan desa harus tersedia dan dapat diakses oleh publik secara mudah. Selain itu, penerapan akuntansi syariah juga memperkuat akuntabilitas, karena aparat desa wajib mempertanggungjawabkan setiap pengelolaan dana publik secara profesional dan amanah.

Akuntansi syariah tidak hanya menjadi alat teknis pencatatan, tetapi juga menjadi media pembentukan integritas dan etika kerja aparatur desa. Hal ini akan mendorong terciptanya pemerintahan desa yang bersih, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

### **C. Tinjauan Konseptual**

#### **1. Sistem Informasi Akuntansi**

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) memiliki peran strategis dalam mengonversi data keuangan menjadi informasi yang relevan dan andal, sehingga mampu mendukung berbagai aktivitas utama dalam rantai nilai secara efektif dan efisien. Dengan demikian, SIA turut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas produk dan layanan yang dihasilkan, efisiensi operasional, serta memperkuat kapasitas manajemen dalam pengambilan keputusan yang tepat.<sup>39</sup>

Di Desa Polewali, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Sistem Informasi Akuntansi yang digunakan berupa aplikasi Siskeudes. Sistem ini berfungsi memperkuat akuntabilitas pemerintah desa melalui pencatatan yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik sesuai aturan yang berlaku, sehingga setiap transaksi keuangan dapat dipertanggungjawabkan kepada

---

<sup>39</sup> Jogiyanto, H.M, Analisis dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis. Yogyakarta: Andi Offset, (2010).

masyarakat dan pihak pengawas. Dengan mengimplementasikan Sistem Informasi Akuntansi berbasis Siskeudes, pengelolaan keuangan desa menjadi lebih terorganisir dan transparan, yang berkontribusi dalam mengurangi risiko penyalahgunaan anggaran serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang efektif, efisien, dan berintegritas.

## 2. Transparansi

Menurut Gunawan, pengelolaan dana, pelaksanaan kegiatan, serta penyusunan laporan wajib disertai dengan penyampaian informasi yang jelas, mudah dimengerti, dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Informasi tersebut hendaknya disebarluaskan secara terbuka melalui media atau saluran komunikasi yang mudah dijangkau. Contoh nyata penerapan prinsip transparansi ini adalah melalui publikasi laporan tahunan serta penyampaian informasi lewat situs resmi atau media komunikasi organisasi terkait.

Prinsip-prinsip ini selaras dengan peran sistem informasi akuntansi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Polewali, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, sebab sistem tersebut mampu mencatat, melaporkan, dan menyajikan data secara efisien dan efektif.<sup>40</sup>

## 3. Akuntabilitas

Menurut Hasniati, akuntabilitas dapat didefinisikan sebagai kewajiban aparat pemerintah desa untuk bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Desa dalam rangka pencapaian tujuan secara ekonomis, efisien, dan efektif.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015).

<sup>41</sup> Hasniati, "Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa."



#### 4. Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan.<sup>42</sup>

#### 5. Prinsip Syari'ah

Penerapan akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan desa didasarkan pada prinsip-prinsip Islam seperti keadilan (*al-'adl*), pertanggungjawaban (*mas'uliyah*), dan kebenaran (*sidq*). Akuntansi syariah tidak hanya berfungsi sebagai sistem pencatatan, tetapi juga mencerminkan amanah, kejujuran, dan akurasi dalam menyajikan informasi keuangan, sehingga berbeda secara mendasar dari akuntansi konvensional yang lebih fokus pada aspek teknis dan profitabilitas.

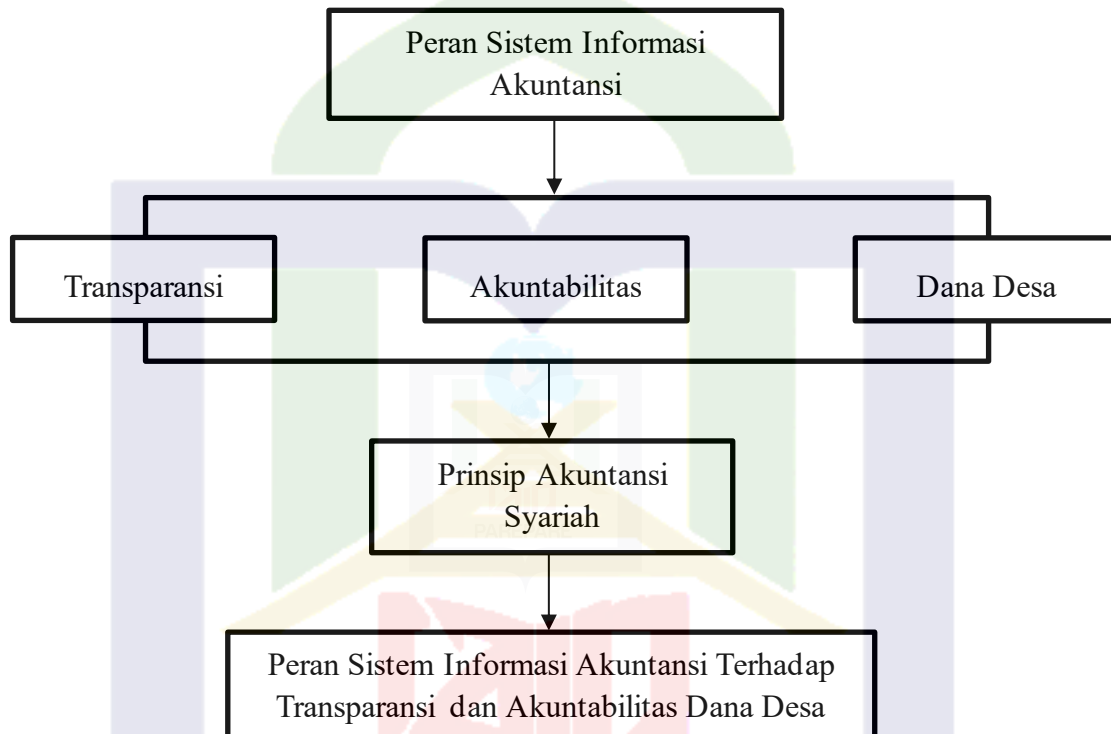
Dalam konteks pemerintahan desa, penerapan akuntansi syariah mendukung terwujudnya transparansi dan akuntabilitas keuangan publik. Setiap transaksi dicatat secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, sehingga mendorong kepercayaan publik serta memperkuat integritas aparatur desa. Selain itu, prinsip syariah yang menekankan etika dan tanggung jawab moral menjadikan akuntansi syariah sebagai sarana untuk mewujudkan tata kelola desa yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat luas.

---

<sup>42</sup> “Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa.,

#### D. Kerangka Pikir

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini terkait dengan peran sistem informasi akuntansi terhadap transparansi dan akuntabilitas. Kerangka penelitian akan dijelaskan lebih rinci pada gambar 2.1 di bawah ini.



**Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir**

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti, serta menyajikan hasil olahan datanya secara deskriptif.

Jenis penelitian ini tergolong sebagai penelitian lapangan (*field research*), yaitu studi yang dilakukan secara sistematis dengan mengandalkan data-data langsung dari lokasi penelitian.<sup>43</sup> Data-data yang diangkat merupakan data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian yaitu Desa Polewali, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.

#### B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Desa Polewali Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. Waktu penelitian yang dibutuhkan yaitu  $\pm 1$  bulan.

#### C. Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini diarahkan pada sistem informasi akuntansi. Peneliti akan menelusuri bagaimana pengelolaan sistem informasi tersebut di Desa Polewali, dengan menitikberatkan pada sejauh mana prinsip akuntabilitas dan transparansi telah diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### D. Jenis Dan Sumber Data

##### 1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif deskriptif sebagai jenis datanya. Data kualitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk non-angka.

---

<sup>43</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (1995: Tarsito, 1995).

Umumnya, jenis data ini menggambarkan situasi atau keadaan yang sedang berlangsung dalam suatu organisasi atau komunitas, sehingga dapat membantu peneliti dalam mengenali permasalahan yang ada. Dalam konteks penelitian ini, data kualitatif diperoleh melalui proses wawancara dan observasi langsung di lapangan.

## **2. Sumber Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu sebagai berikut:

### **a. Data Primer**

Dalam penelitian ini, pengambilan data primer dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara terhadap perangkat desa beserta dengan masyarakat desa Polewali. Adapun data primer dalam penelitian ini berujuk pada hasil observasi pada proses pelaporan dana desa serta hasil wawancara kepada beberapa pihak yaitu perangkat desa Polewali kecamatan Suppa, BPD, dan tokoh masyarakat.

### **b. Data sekunder**

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berasal dari dokumen laporan keuangan desa serta berbagai studi atau hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan fokus dan konsep penelitian ini.

## **E. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data**

Adapun metode pengumpulan yang penyusun gunakan adalah sebagai berikut:

### **1. Observasi**

Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi secara langsung terhadap objek yang diteliti dengan meninjau secara nyata sistem informasi akuntansi yang

diterapkan di Kantor Desa Polewali, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang. Pengamatan secara langsung akan dilakukan oleh penelliti dengan cara mencatat seluruh aktivitas mulai dari input data hingga pelaporan data yang menggunakan sistem informasi akuntansi.

## 2. Wawancara

Dalam metode ini, penulis menerapkan teknik wawancara semi-terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan secara fleksibel namun tetap berada dalam koridor topik penelitian. Artinya, pewawancara memberikan kebebasan kepada informan dalam menyampaikan pendapatnya, namun tetap diarahkan agar pembahasan tetap relevan dengan tujuan penelitian. Pendekatan ini dipilih agar proses wawancara berlangsung lebih lancar, terbuka, dan komunikatif.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang bertujuan memperoleh berbagai catatan penting yang relevan dengan permasalahan penelitian. Melalui metode ini, peneliti dapat menghimpun data yang valid, lengkap, dan tidak bersifat asumtif. Dalam konteks penelitian ini, peneliti akan menelusuri dan mengumpulkan berbagai dokumen yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian yang dikaji.

## F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data bertujuan memastikan bahwa data yang diperoleh peneliti benar-benar mencerminkan realitas yang terjadi di lapangan. Artinya, informasi yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena sesuai dengan kondisi objek penelitian. Dalam pendekatan kualitatif, uji keabsahan data dilakukan melalui beberapa teknik berikut:

### 1. Kepercayaan (*Credibility*)

*Credibility* atau derajat kepercayaan pada penelitian kualitatif merupakan istilah validasi yang berarti bahwa instrumen yang di pergunakan dan hasil pengukuran yang dilakukan menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.

### 2. Uji *Transferability*

Dalam penelitian kualitatif tidak dikenal validasi eksternal tetapi menggunakan istilah konsep keterampilan atau transferabilitas keteralihan berarti bahwa hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan pada kondisi lain yang memiliki karakteristik dan konteks yang relatif sama.

### 3. Uji *Dependability* (reabilitas)

Dalam penelitan kualitatif dikenal juga dengan istilah *reabilitas* yang menunjukan konsistensi hasil penelitian meskipun penelitian itu dilakukan berulang kali.

### 4. Uji Triangulasi

Triangulasi data adalah metode pengumpulan data yang menggabungkan berbagai data dan sumber yang sudah ada. Menyatakan bahwa triangulasi data merupakan metode untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber dalam berbagai cara dan pada waktu yang berbeda. Akibatnya, terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.

#### a. Triangulasi Sumber

Pengujian kredibilitas data dilakukan dengan memeriksa data dari berbagai sumber, seperti arsip, hasil wawancara, dan dokumen lainnya.

b. Triangulasi Teknik

Pengujian kredibilitas data dilakukan dengan memeriksa data dari sumber yang sama menggunakan berbagai teknik. Misalnya, data yang diperoleh dari hasil observasi diuji melalui wawancara.

c. Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan melalui metode wawancara dipagi hari pada saat itu dapat mempengaruhi kredibilitasnya. Data yang dihasilkan dari narasumber yang masih segar biasanya lebih valid. Oleh karena itu, untuk menguji validitas data, pengecekan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi harus dilakukan pada berbagai waktu atau situasi.<sup>44</sup>

**G. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian kualitatif, proses analisis data seringkali lebih kompleks dibandingkan pendekatan kuantitatif. Peneliti dituntut memiliki pemahaman teori yang kuat agar hasil analisis tidak bersifat subjektif semata, melainkan didasarkan pada landasan ilmiah yang kokoh. Pendekatan kualitatif memiliki karakteristik yang dinamis dan fleksibel, karena data yang dikumpulkan di lapangan tidak selalu terbatas pada fokus awal penelitian. Seringkali, data berkembang mengikuti kondisi nyata yang dihadapi di lapangan. Oleh sebab itu, untuk menjaga agar kajian tetap berada dalam koridor yang sesuai, peneliti perlu menerapkan strategi tertentu agar penelitian tidak melebar dan tetap fokus pada tujuan yang telah ditetapkan.

---

<sup>44</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (bandung: alfabeta, 2015).

### 1. Reduksi Data

Dalam proses penelitian ini, tahap reduksi data dilakukan dengan cara memilah dan menyederhanakan informasi yang diperoleh dari lapangan, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam pengelolaan dana desa. Informasi yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan fokus utama penelitian, seperti aspek yang tidak mendukung analisis terhadap transparansi dan akuntabilitas, tidak dimasukkan dalam analisis lanjutan. Contohnya, dalam data hasil wawancara dengan aparatur desa, hanya bagian-bagian yang membahas isu transparansi atau akuntabilitas yang akan diseleksi untuk dianalisis lebih lanjut, sedangkan bagian lain yang tidak relevan akan disisihkan. Reduksi ini dilakukan secara bertahap dan berulang selama proses penelitian berlangsung untuk memastikan bahwa data yang dianalisis benar-benar sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian.

### 2. Penyajian Data

Setelah proses reduksi dilakukan, tahap berikutnya adalah menyusun dan menampilkan data dalam bentuk yang lebih sistematis dan mudah dipahami. Penyajian data ini dapat berupa narasi deskriptif, tabel, atau matriks, yang mempermudah analisis lebih lanjut. Sebagai contoh, informasi yang telah disaring sebelumnya dapat diklasifikasikan berdasarkan indikator-indikator transparansi dan akuntabilitas, sehingga hubungan antara data dan fokus penelitian menjadi lebih jelas dan terstruktur.

### 3. Kesimpulan Atau *Drawing Conclusion*

Pada tahap akhir analisis, peneliti melakukan penarikan kesimpulan yang didasarkan pada hasil reduksi dan penyajian data. Proses ini dilakukan dengan



mengkaji keterkaitan antara temuan lapangan dan teori-teori yang relevan terkait Sistem Informasi Akuntansi, transparansi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Untuk memastikan keabsahan hasil penelitian, kesimpulan yang diperoleh juga akan dikonfirmasi melalui proses verifikasi silang terhadap data dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi yang telah dikumpulkan sebelumnya.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Polewali Kecamatan Suppa kabupaten Pinrang, sebagai sasaran penelitian. Penelitian dilakukan dengan beberapa tahapan diantaranya yaitu tahapan pengamatan (observasi), tahapan pengamatan tersebut dilakukan dengan mengamati seluruh aspek yang terkait dengan sistem informasi akuntansi yang digunakan pada Desa Polewali terkait Transparansi dan Akuntabilitas. Yang kedua tahapan wawancara, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa narasumber yang mengetahui secara jelas terkait dengan penerapan sistem informasi akuntansi pada pengelolaan dana desa di Desa Polewali. Narasumber pada penelitian ini yaitu perangkat desa, anggota BPD, dan masyarakat Desa Polewali. Tahapan terakhir yaitu dokumentasi. Hasil penelitian dijelaskan merujuk pada rumusan masalah berikut:

##### 1. Sistem Informasi Akuntansi yang Digunakan Di Desa Polewali Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang

Hasil penelitian merujuk pada rumusan masalah yang pertama yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi yang digunakan di Desa Polewali kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. Bagaimana sistem informasi akuntansi yang digunakan untuk mengelola laporan keuangan di Desa Polewali kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, berikut hasil wawancara dari perangkat Desa Polewali yang dijelaskan oleh Arsyad yaitu:

*“Untuk Desa polewali sampai saat ini, itu menggunakan sistem informasi akuntansi yaitu aplikasi siskeudes dalam pengelolaan keuangannya baik itu dana desa, add, dan sumber pendapatan yang lain. Jadi, ini semacam program komputer atau aplikasi yang dipakai untuk mengatur keuangan di desa.”<sup>45</sup>*

Hasil wawancara menyebutkan bahwa sistem informasi akuntansi yang digunakan di desa polewali adalah aplikasi siskeudes, Siskeudes adalah aplikasi yang digunakan untuk membantu desa mengelola keuangannya secara lebih mudah, tertib, dan transparan.

Dengan penggunaan siskeudes apakah cukup membantu dalam mempermudah pengelolaan keuangan desa, dan apakah ada kendala yang biasa dihadapi ketika menggunakan sistem informasi akuntansi, berikut penjelasan dari Muhammad Rasyid yakni bendahara desa:

*“Cukup membantu karna didalam aplikasi tersebut sudah tersedia buku pembantu bank, buku kas umum, dan pelaporan lainnya yang dibutuhkan dalam satu kali penginputan, yang sangat membantu kaur atau bendahara dalam melakukan pelaporan. Dan terkait kendala untuk di desa polewali sendiri belum menemukan kendala terkait hal itu, karena aplikasi ini kerap diperbaiki setiap tahunnya, sehingga jika operator menemukan kendala bisa langsung disampaikan dan diperbaiki untuk kedepannya.”<sup>46</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa penggunaan Siskeudes cukup membantu aparat desa, karena di dalam aplikasinya sudah tersedia fitur-fitur penting seperti buku pembantu bank, buku kas umum, dan berbagai pelaporan lainnya yang dibutuhkan. Semuanya bisa dikerjakan dalam satu kali penginputan data, jadi lebih praktis dan efisien. Untuk di Desa Polewali sendiri, sejauh ini

---

<sup>45</sup> Muhammad Arsyad, Sekretaris Desa Polewali, Wawancara di Kantor Desa Polewali Kecamatan Suppa, 04 Juni 2025.

<sup>46</sup> Muhammad Rasyid, Bendahara Desa Polewali, Wawancara di Kantor Desa Polewali Kecamatan Suppa, 04 Juni 2025.

belum ditemukan kendala dalam penggunaannya, karena aplikasi ini selalu diperbaiki setiap tahunnya. Setelah memahami manfaat dan kemudahan yang diberikan oleh aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa, penting juga untuk mengetahui bagaimana informasi tersebut disampaikan kepada masyarakat.

Selain mekanisme penggunaan siskeudes, hal yang juga penting untuk dikaji adalah bagaimana bentuk keterbukaan laporan keuangan desa dan dalam bentuk apa dijelaskan oleh pak Arsyad:

*“Kalau untuk laporan keuangan secara rinci hanya khusus untuk pemeriksaan seperti inspektorat atau bpk biasanya laporan tersebut diambil oleh pemerintah provinsi, dan pmd”.<sup>47</sup>*

Laporan keuangan desa secara rinci umumnya tidak dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat luas, melainkan disiapkan khusus untuk keperluan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang, seperti Inspektorat, BPK, pemerintah provinsi, dan Dinas PMD. Laporan tersebut biasanya diambil langsung oleh instansi terkait sebagai bagian dari proses pengawasan dan evaluasi penggunaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun transparansi tetap dijaga melalui publikasi ringkasan atau papan informasi, laporan detail tetap menjadi dokumen yang bersifat internal dan digunakan untuk kepentingan audit serta pertanggungjawaban formal kepada lembaga pengawas.

Adapun sejauh mana sistem informasi akuntansi memudahkan penyusunan laporan pertanggungjawaban menurut Rasyid yaitu:

---

<sup>47</sup> Muhammad Arsyad, Sekretaris Desa Polewali, Wawancara di Kantor Desa Polewali Kecamatan Suppa, 04 Juni 2025

*“Sangat memudahkan karna sudah menyediakan beberapa fitur yang ada dalam aplikasi siskeudes yang sangat membantu kaur atau bendahara dalam melakukan pelaporan”<sup>48</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rasyid, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi melalui aplikasi Siskeudes sangat memudahkan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan desa. Hal ini disebabkan oleh adanya berbagai fitur yang tersedia dalam aplikasi tersebut, yang secara teknis membantu perangkat desa, khususnya kaur keuangan atau bendahara, dalam proses pelaporan secara lebih cepat, akurat, dan terstruktur.

## **2. Peran Sistem Informasi Akuntansi Dalam meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Polewali, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang**

Penelitian yang dilakukan di Kantor Desa Polewali, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang terkait peran sistem informasi akuntansi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa menurut Pak Arsyad adalah sebagai berikut:

*“Berperan sangat bagus karena dalam aplikasi tersebut semua sudah diuraikan dengan baik sehingga mempermudah penginputan”<sup>49</sup>*

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa dengan adanya sistem informasi akuntansi sangat membantu dalam pelaksanaan tugas karena sudah menyediakan fitur-fitur yang lengkap dan terstruktur dengan baik. Setiap langkah dalam pengelolaan keuangan, mulai dari pencatatan, penginputan anggaran, hingga

---

<sup>48</sup> Muhammad Rasyid, bendahara Desa Polewali, Wawancara di Kantor Desa Polewali Kecamatan Suppa, 04 Juni 2025

<sup>49</sup> Muhammad Arsyad, Sekretaris Desa Polewali, Wawancara di Kantor Desa Polewali Kecamatan Suppa, 04 Juni 2025.

pelaporan, telah dijelaskan secara rinci dalam sistem. Hal ini membuat proses penginputan data menjadi lebih mudah, cepat, dan minim kesalahan. Sehingga aparat desa atau kaur tidak perlu lagi membuat format manual karena semuanya sudah tersedia dalam aplikasi Siskeudes.

Adapun mengenai keterbukaan pemerintah desa dalam menyampaikan informasi dana desa kepada masyarakat menurut informan yakni pak Azis selaku anggota BPD sebagai berikut:

*“Menurut saya cukup terbuka, karena selalu diinformasikan melalui rapat mengenai berapa realisasi dana desa untuk tahun sebelum nya”<sup>50</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Azis selaku anggota BPD, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Polewali telah menunjukkan sikap keterbukaan dalam menyampaikan informasi terkait dana desa kepada masyarakat. Hal ini terlihat dari adanya penyampaian secara rutin mengenai realisasi dana desa tahun sebelumnya melalui forum rapat desa, yang menjadi wadah komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Menurut Pak Azis, mekanisme ini mencerminkan upaya pemerintah desa dalam menjaga transparansi, khususnya dalam hal pelaporan penggunaan anggaran, sehingga masyarakat dapat mengetahui sejauh mana dana desa telah direalisasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Adapun menurut bapak Sulaiman selaku masyarakat yaitu:

*“Iya, karena kalau ada rapat dihadirkan para warga, tokoh agama, dan yang lain dalam hal perencanaan pembangunan yang menggunakan dana desa”<sup>51</sup>*

---

<sup>50</sup>Pak Azis, Anggota BPD Desa Polewali, Wawancara di Desa Polewali Kecamatan Suppa, 04 juni 2025.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sulaiman selaku masyarakat, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Polewali telah melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan yang menggunakan dana desa. Hal ini tercermin dari kehadiran berbagai unsur masyarakat, seperti warga umum dan tokoh agama, dalam setiap rapat perencanaan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Partisipasi tersebut menunjukkan adanya keterbukaan dan transparansi, di mana masyarakat diberi ruang untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa demi kepentingan bersama. Keterbukaan pemerintah desa dalam menyampaikan penggunaan dana desa juga diungkapkan oleh ibu Sattia selaku masyarakat bahwa:

*“Menurut saya, pemerintah desa lumayan terbuka, memang disampaikan pas ada pertemuan atau musyawarah desa, tapi nda semua warga tahu detailnya. Kadang kita hanya tahu garis besarnya saja, Jadi ya... bisa dibilang terbuka, tapi nda maksimal pi.”<sup>52</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sittia selaku masyarakat, dapat disimpulkan bahwa keterbukaan pemerintah Desa Polewali dalam menyampaikan penggunaan dana desa sudah ada, namun belum sepenuhnya maksimal. Informasi mengenai dana desa memang disampaikan melalui pertemuan atau musyawarah desa, tetapi menurutnya penyampaian tersebut masih bersifat umum dan tidak menjangkau seluruh warga secara rinci. Masyarakat hanya mengetahui garis besar penggunaan dana, tanpa penjelasan detail yang menyeluruh, sehingga meskipun

---

<sup>51</sup> Pak Sulaiman, Masyarakat Desa Polewali, Wawancara di Desa Polewali Kecamatan Suppa, 08 Juni 2025

<sup>52</sup> Ibu Sattia, Masyarakat Desa Polewali, wawancara di Desa Polewali kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, 5 Juni 2025

sudah ada upaya transparansi, masih diperlukan peningkatan dalam hal kejelasan informasi dan pemerataan penyampaian kepada seluruh lapisan masyarakat.

Adapun cara penyampaian informasi penggunaan dana desa dijelaskan oleh Nurul selaku masyarakat yaitu:

*“Biasanya informasi soal dana desa itu disampaikan lewat rapat dusun atau musyawarah desa. Jadi kalau ada pembangunan atau kegiatan yang mau dikerja, diundang ki dulu warga untuk dikasih tahu rencana dan anggarannya. Selain itu saya pernah lihat ada papan informasi di depan kantor desa yang ditempel daftar anggaran dan kegiatan. Tapi kadang tulisannya kecil dan tidak terlalu jelas, apalagi kalau kita nda biasa baca angka-angka. Jadi memang ada media yang digunakan, tapi lebih efektif kalau langsung disampaikan waktu rapat.”<sup>53</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nurul selaku masyarakat, dapat disimpulkan bahwa penyampaian informasi penggunaan dana desa di Desa Polewali umumnya dilakukan melalui rapat dusun atau musyawarah desa, yang dinilai sebagai cara paling efektif karena memungkinkan warga untuk memahami langsung rencana dan anggaran kegiatan. Meskipun tersedia media lain seperti papan informasi di depan kantor desa, namun keberadaannya kurang optimal karena informasi yang disajikan kurang jelas dan sulit dipahami oleh sebagian warga. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada upaya transparansi melalui berbagai media, penyampaian langsung melalui pertemuan warga masih dianggap paling efektif dan perlu terus ditingkatkan.

Adapun menurut Hj. Rahmawati mengenai apakah dana desa sudah digunakan sesuai kebutuhan masyarakat yaitu:

---

<sup>53</sup> Ibu Nurul, Masyarakat Desa Polewali, Wawancara di Desa Polewali, Kecamatan Suppa, 19 Juni 2025



*“Kalau saya lihat, kebanyakan memang sesuai kebutuhan masyarakat, terutama yang menyangkut pembangunannya, saya rasa sudah cukup sesuai”<sup>54</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hj. Rahmawati, dapat disimpulkan bahwa dana desa di Desa Polewali dinilai telah digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam hal pembangunan. Menurutnya, sebagian besar program dan kegiatan yang dibiayai dana desa sudah mencerminkan kebutuhan warga, sehingga pelaksanaannya dirasa cukup tepat dan bermanfaat bagi masyarakat secara umum. Bapak yahya juga menjelaskan tentang hal tersebut bahwa:

*“kalau saya ya sudah sesuai kebutuhan masyarakat, kalo ada masukan dari warga juga bisa disampaikan pada saat rapat jadi kebutuhan yang kita mau itu bisa direalisasikan jika memang bagus”<sup>55</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yahya, dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana desa di Desa Polewali sudah cukup sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan usulan atau masukan dalam rapat desa, sehingga kebutuhan yang dianggap penting dan bermanfaat bisa dipertimbangkan dan direalisasikan oleh pemerintah desa. Hal ini menunjukkan bahwa selain dana desa digunakan secara tepat sasaran, proses perencanaannya juga melibatkan partisipasi warga, yang

---

<sup>54</sup> Ibu Hj. Rahmawati, Anggota BPD, Wawancara di Desa Polewali, Kecamatan Suppa, 6 Juni 2025

<sup>55</sup> Bapak Muhammad Yahya, Masyarakat Desa Polewali, Wawancara Di Desa Polewali Kecamatan Suppa, 19 Juni 2025

menjadi indikator penting dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Lantas apa kegiatan desa yang pernah dilihat atau diketahui yang dana nya berasal dari dana desa, darna menjelaskan bahwa:

*"kalo yang kuliat itu ada beberapa kegiatan yang dananya dari dana desa. Contohnya jalan tani di belakang, yang dulunya becek dan susah dilalui, sekarang sudah dibeton jadi lebih gampang ki kalau mau angkut hasil panen. Terus ada juga panggung yang baru dibangun di lapangan, itu katanya buat acara 17 Agustus nanti, jadi disiapkan dari sekarang. Waktu posyandu, itu juga pakai dana desa, ada makanan tambahan buat anak-anak, Jadi memang banyak kegiatan yang kita bisa lihat langsung, dan memang terasa manfaatnya buat warga."*<sup>56</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Darna, dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana desa di Desa Polewali telah diwujudkan dalam berbagai kegiatan yang nyata dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Beberapa kegiatan yang disebutkan antara lain pembangunan jalan tani untuk mempermudah akses petani, pembangunan panggung di lapangan desa untuk persiapan acara 17 Agustus, serta pelaksanaan kegiatan posyandu yang dilengkapi dengan makanan tambahan untuk anak-anak. Hal ini menunjukkan bahwa dana desa telah digunakan untuk mendukung kebutuhan fisik, sosial, dan kesehatan masyarakat secara langsung dan tepat sasaran. pendapat itu juga didukung melalui penjelasan dari bapak tajuddin yaitu:

*"ada ji seperti pembangunan jalan beton, panggung di lapangan, ada juga biasa timbunan untuk jalan"*<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Ibu Darna, Masyarakat Desa Polewali, Wawancara Di Desa Polewali Kecamatan Suppa, 18 Juni 2025

<sup>57</sup> Bapak tajuddin, Anggota BPD, Wawancara Di Desa Polewali Kecamatan Suppa, 19 Juni 2025

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa dana desa di Desa Polewali telah dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan fisik yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal ini mencerminkan bahwa dana desa telah digunakan untuk meningkatkan infrastruktur desa yang mendukung aktivitas dan kenyamanan warga dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun menurut Friska Hamdana bagaimana pengelolaan dana desa selama ini yaitu:

*“kalo saya selama ini sudah cukup baik, hanya perlu ditingkatkan untuk transparansi nya supaya masyarakat itu semuanya bisa jangkau informasi nya”<sup>58</sup>*

Pengelolaan dana desa selama ini dinilai sudah cukup baik. Namun, ia menekankan bahwa transparansi masih perlu ditingkatkan agar seluruh masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan memahami informasi terkait penggunaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pelaksanaan program berjalan baik, keterbukaan informasi tetap menjadi aspek penting yang perlu diperbaiki untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang lebih partisipatif dan akuntabel.

Dan terkait harapan ke depannya agar dana desa dikelola lebih baik lagi diungkapkan oleh pak Tamrin selaku ketua BPD bahwa:

*“Harapan saya tata kelola yang selama ini dilaksanakan oleh pihak desa itu dipertahankan. Dan kalau perlu lebih ditingkatkan sehingga setiap kegiatan dilaksanakan oleh pihak desa itu dapat diterima dan dinikmati oleh semua*

---

<sup>58</sup> Friska Hamdana, Masyarakat Desa Polewali, wawancara Di Desa Polewali kecamatan Suppa, 18 Juni 2025

*lapisan masyarakat desa khususnya masyarakat desa Polewali, untuk pembangunan nya juga saya berharap bisa lebih merata disetiap dusun.”<sup>59</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Tamrin selaku Ketua BPD, dapat disimpulkan bahwa harapan ke depan terhadap pengelolaan dana desa adalah agar tata kelola yang sudah berjalan dengan baik tetap dipertahankan dan bahkan ditingkatkan. Ia menekankan pentingnya agar setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, serta berharap agar pembangunan dapat dilakukan secara lebih merata di setiap dusun di Desa Polewali. Hal ini mencerminkan harapan akan pengelolaan dana desa yang tidak hanya transparan dan bertanggung jawab, tetapi juga berkeadilan.

## **B. Pembahasan**

### **1. Sistem Informasi Akuntansi Yang Digunakan Di Desa Polewali Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang**

Berdasarkan hasil penelitian yang merujuk pada rumusan masalah pertama, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan laporan keuangan di Desa Polewali, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, adalah aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa). Aplikasi ini diimplementasikan sebagai alat utama dalam pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan desa, termasuk dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), serta sumber pendapatan lainnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Ardana dan Hendro yang menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, dan memproses data keuangan serta non-keuangan yang berkaitan dengan transaksi, untuk kemudian menghasilkan

---

<sup>59</sup> Bapak Tamrin, Ketua BPD, Wawancara Di Desa Polewali Kecamatan Suppa, 05 Juni 2025

informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks Desa Polewali, keberadaan Siskeudes telah mendukung pencatatan dan pelaporan yang lebih tertib, sistematis, dan efisien. Informasi yang dihasilkan oleh aplikasi ini tidak hanya bersifat internal, tetapi juga berfungsi sebagai bahan laporan kepada pihak eksternal seperti Inspektorat, BPK, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).

Lebih lanjut, sesuai dengan teori Krismiaji bahwa sistem informasi akuntansi harus mampu mendukung kegiatan perencanaan, pengendalian, dan operasional, maka implementasi Siskeudes di Desa Polewali telah memenuhi kriteria tersebut. Hal ini ditunjukkan melalui fitur-fitur yang tersedia di dalam aplikasi, seperti buku kas umum, buku pembantu bank, dan laporan-laporan keuangan lainnya yang terintegrasi dalam satu sistem input. Menurut wawancara dengan Muhammad Rasyid, selaku bendahara desa, penggunaan Siskeudes sangat membantu karena hanya memerlukan satu kali penginputan data untuk menghasilkan berbagai jenis laporan. Efisiensi ini menunjukkan bahwa aplikasi tersebut sangat mendukung kinerja perangkat desa, khususnya dalam menyusun laporan pertanggungjawaban yang akurat dan tepat waktu. Bahkan, hingga saat ini belum ditemukan kendala berarti dalam penggunaannya, karena sistem selalu mengalami pembaruan tiap tahun, serta responsif terhadap masukan dari operator desa. Ini mengindikasikan bahwa sistem informasi akuntansi yang digunakan memiliki tingkat *adaptability* dan *reliability* yang tinggi, sesuai dengan indikator kualitas sistem informasi yang diuraikan dalam teori.

Mulyadi menekankan bahwa sistem informasi akuntansi harus mampu menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan manajemen secara cepat dan

tepat waktu, serta menjaga keamanan data dan aset. Dalam hal ini, aplikasi Siskeudes telah memberikan manfaat yang signifikan bagi Desa Polewali. Selain cepat dalam menghasilkan informasi, sistem ini juga membantu memastikan bahwa proses pengelolaan keuangan desa dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar, sehingga dapat mengurangi potensi penyimpangan. Informasi yang dihasilkan dari sistem juga telah digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran desa (RKPDDes dan APBDDes), serta menjadi alat kontrol dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Namun demikian, dari sisi transparansi kepada masyarakat, ditemukan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh aplikasi Siskeudes tidak sepenuhnya dibuka kepada publik secara rinci. Berdasarkan keterangan dari Arsyad, laporan keuangan secara lengkap hanya disiapkan untuk keperluan pemeriksaan oleh lembaga pengawas, dan bukan untuk konsumsi masyarakat umum. Masyarakat hanya mendapatkan informasi melalui media informasi terbatas seperti papan informasi atau pertemuan warga. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dari sisi internal sistem informasi akuntansi telah berjalan dengan baik, namun dari aspek transparansi publik masih perlu ditingkatkan agar sejalan dengan prinsip good governance. Menurut Kieso, sistem informasi akuntansi juga bertujuan untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak berkepentingan, baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, pembatasan akses terhadap informasi keuangan secara rinci, meskipun mungkin dilakukan demi alasan keamanan data dan ketentuan audit, tetap perlu dikaji ulang agar tidak bertentangan dengan prinsip keterbukaan.

Selain itu, jika ditinjau dari teori Romney dan Steinbart, disebutkan bahwa tujuan dari sistem informasi akuntansi mencakup tiga hal utama, yaitu mendukung

fungsi manajemen, mendukung pengambilan keputusan, dan mendukung kegiatan operasional sehari-hari. Berdasarkan fakta lapangan, semua fungsi tersebut telah dijalankan oleh Siskeudes di Desa Polewali. Sistem ini mampu menyediakan laporan yang dibutuhkan oleh perangkat desa dalam menyusun kebijakan keuangan, membuat keputusan penganggaran, serta menjalankan aktivitas operasional desa secara efisien. Bahkan dari sisi pengendalian internal, sistem ini telah memberikan kemudahan dalam pelacakan dana, pencegahan penyalahgunaan, dan pengarsipan historis keuangan desa yang dapat diakses kembali kapan saja bila diperlukan.

Dengan mempertimbangkan keseluruhan temuan dan membandingkannya dengan teori-teori yang digunakan, maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi melalui aplikasi Siskeudes telah memainkan peran yang cukup optimal dalam pengelolaan laporan keuangan desa. Aplikasi ini telah mendukung proses pencatatan, pengolahan, dan pelaporan keuangan secara efektif dan efisien, dengan tingkat kesalahan yang rendah dan kemudahan akses bagi pengguna internal. Namun demikian, terdapat ruang perbaikan dalam aspek penyampaian informasi kepada masyarakat luas agar prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dapat diwujudkan secara lebih menyeluruh. Upaya peningkatan literasi masyarakat terkait keuangan desa, serta penggunaan media komunikasi digital atau tatap muka yang lebih interaktif, dapat menjadi langkah strategis untuk menguatkan keterlibatan masyarakat dalam mengawal pengelolaan dana desa.

## **2. Peran Sistem Informasi Akuntansi Dalam meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Polewali, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap berbagai informan di Desa Polewali, dapat diidentifikasi sejumlah pola utama yang menunjukkan bagaimana sistem informasi akuntansi, khususnya melalui aplikasi Siskeudes, telah berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Temuan utama tersebut meliputi: (1) kemudahan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan desa, (2) keterbukaan informasi kepada masyarakat, (3) partisipasi masyarakat dalam perencanaan, (4) kesesuaian penggunaan dana desa dengan kebutuhan masyarakat, dan (5) eksistensi kegiatan nyata yang dirasakan manfaatnya secara langsung oleh warga.

Dari hasil wawancara dengan Arsyad selaku perangkat desa, diketahui bahwa penggunaan sistem informasi akuntansi melalui aplikasi Siskeudes telah sangat membantu dalam menjalankan tugas-tugas administratif desa. Ia menekankan bahwa semua proses keuangan, mulai dari penginputan hingga pelaporan, telah diatur dengan sistematis dalam aplikasi tersebut. Ini menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi telah menggantikan sistem manual yang sebelumnya rentan kesalahan, sesuai dengan pandangan Romney dan Steinbart yang menyatakan bahwa SIA modern mengelola transaksi melalui komputerisasi dan menghasilkan informasi yang relevan secara efisien. Dengan fitur lengkap yang telah terstruktur, aplikasi ini mampu meminimalkan kesalahan, mempercepat waktu proses, serta meningkatkan akurasi data, yang secara langsung mendukung fungsi manajemen



desa dalam melakukan pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan yang tepat.

berkaitan dengan transparansi, hasil wawancara dengan anggota BPD (Pak Azis), warga masyarakat (Pak Sulaiman, Ibu Sittia, dan Nurul), menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melakukan penyampaian informasi dana desa kepada masyarakat melalui forum rapat dan musyawarah desa. Rapat ini dijadikan sebagai media utama untuk menjelaskan realisasi anggaran serta perencanaan kegiatan, yang memungkinkan masyarakat mendapatkan informasi langsung mengenai penggunaan dana desa. Meski demikian, sebagaimana dikemukakan oleh Ibu Sittia dan Nurul, keterbukaan tersebut belum maksimal. Informasi yang disampaikan masih bersifat umum, dan media informasi seperti papan anggaran kurang efektif karena informasinya tidak disajikan dengan jelas atau mudah dipahami. Hal ini menggambarkan bahwa transparansi secara formal sudah dijalankan, namun dari segi kualitas dan jangkauan informasi, masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, transparansi menuntut penyampaian informasi yang terbuka dan jujur, di mana masyarakat berhak untuk mengetahui secara menyeluruh bagaimana dana dikelola. Teori Mardiasmo pun menekankan bahwa transparansi tidak hanya soal ketersediaan informasi, tetapi juga kejelasan dan kemudahan dalam mengakses informasi tersebut agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa menjadi indikator penting dalam mewujudkan akuntabilitas. Hasil wawancara dengan Pak Sulaiman dan Bapak Yahya menunjukkan bahwa warga dilibatkan dalam rapat perencanaan pembangunan. Mereka diberi ruang untuk memberikan masukan atau usulan

kegiatan yang dinilai penting. Ini mencerminkan pelaksanaan prinsip akuntabilitas sebagaimana dijelaskan oleh Webster dan Mardiasmo, di mana pengelolaan keuangan yang akuntabel mencakup tanggung jawab kepada masyarakat sebagai pihak yang mempercayakan sumber daya publik kepada pemerintah. Keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan mencerminkan wujud pertanggungjawaban pemerintah desa atas penggunaan anggaran sesuai kebutuhan riil masyarakat.

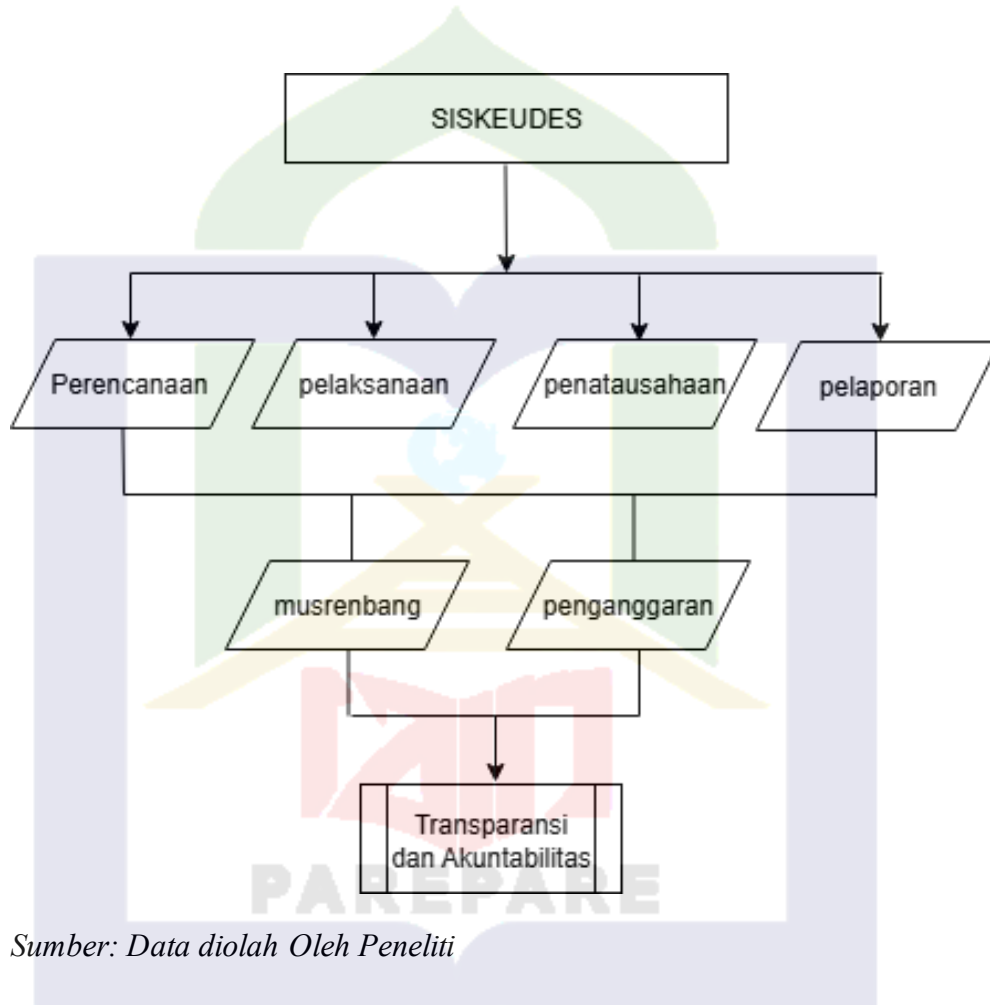
Terdapat indikasi kuat bahwa penggunaan dana desa telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh informan seperti Hj. Rahmawati dan Bapak Yahya yang menyatakan bahwa program pembangunan yang dilakukan, khususnya infrastruktur dan pelayanan sosial seperti posyandu, telah mencerminkan kebutuhan warga desa. Ini diperkuat dengan hasil wawancara dari Ibu Darna dan Bapak Tajuddin yang menyebutkan kegiatan nyata yang telah dilaksanakan, seperti pembangunan jalan tani, panggung desa, dan timbunan jalan, serta penyediaan makanan tambahan di posyandu. Dengan melihat hasil-hasil nyata ini, maka penggunaan dana desa di Desa Polewali sudah memenuhi karakteristik akuntabilitas berbasis hasil (*output-based accountability*) sebagaimana disebutkan dalam teori Mardiasmo, yakni bahwa hasil program harus sesuai dengan tujuan dan manfaatnya. Selain itu, akuntabilitas keuangan publik juga mencakup efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran, di mana anggaran yang tersedia benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan sekadar untuk memenuhi formalitas administratif.

Meskipun banyak warga menilai pengelolaan dana desa sudah cukup baik, terdapat harapan agar transparansi terus ditingkatkan. Friska Hamdana dan Pak Tamrin, selaku Ketua BPD, menyatakan bahwa ke depan pengelolaan dana desa

harus dilakukan secara lebih merata dan terbuka. Informasi terkait kegiatan dan alokasi dana perlu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya oleh mereka yang hadir dalam forum rapat. Harapan ini menunjukkan pentingnya membangun sistem informasi yang tidak hanya akurat, tetapi juga inklusif, di mana semua pihak bisa mengakses informasi dengan mudah. Hal ini sesuai dengan pandangan Romney dan Steinbart, bahwa sistem informasi akuntansi tidak hanya mendukung kegiatan manajemen dan operasional, tetapi juga menjadi sarana komunikasi yang menjamin pengelolaan sumber daya organisasi secara terbuka dan bertanggung jawab kepada publik.

Secara keseluruhan, berdasarkan temuan-temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi di Desa Polewali melalui aplikasi Siskeudes telah memainkan peran penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sistem ini telah berhasil mengintegrasikan proses penginputan, pencatatan, dan pelaporan secara lebih efisien dan minim kesalahan. Di sisi lain, meskipun telah dilakukan upaya transparansi melalui musyawarah dan papan informasi, masih diperlukan peningkatan kualitas dan jangkauan informasi agar benar-benar dapat diakses dan dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan juga merupakan bentuk akuntabilitas yang baik, namun pemerintah desa harus memastikan bahwa seluruh proses dan hasil dari penggunaan dana desa disampaikan secara terbuka dan tepat sasaran. Dengan demikian, peran sistem informasi akuntansi tidak hanya terbatas pada aspek teknis pelaporan, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam menciptakan pemerintahan desa yang bersih, terbuka, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Berikut alur penggunaan aplikasi Siskeudes mulai dari input data melalui aplikasi Siskeudes hingga menghasilkan laporan yang memenuhi prinsip akuntansi yang transparan dan akuntabel:



*Sumber: Data diolah Oleh Peneliti*

**Gambar 4.1 Alur Penggunaan Aplikasi Siskedeus**

### **3. Penerapan prinsip Akuntansi Syariah pada Sistem Informasi Akuntansi yang digunakan di Desa Polewali Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang**

Pengelolaan keuangan desa yang baik tidak hanya mengandalkan prinsip-prinsip akuntansi konvensional, tetapi juga perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip akuntansi syariah, terutama dalam masyarakat mayoritas Muslim seperti di Desa Polewali, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang. Akuntansi syariah menekankan nilai keadilan (*al-'adl*), transparansi (*al-shafafiyah*), dan pertanggungjawaban (*mas'uliyah*). Dalam praktiknya, pencatatan transaksi bukan hanya kegiatan administratif, melainkan bagian dari amanah dan tanggung jawab moral yang harus dijaga. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip syariah memberikan dasar etika yang kuat dalam pengelolaan dana publik, termasuk dalam penyusunan dan pelaporan keuangan desa.

Berdasarkan hasil wawancara, Desa Polewali menggunakan aplikasi Siskeudes sebagai sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan keuangan desa, yang terbukti membantu proses pelaporan secara efisien dan akurat. Fitur-fitur seperti buku kas umum, buku pembantu bank, dan format laporan pertanggungjawaban memungkinkan perangkat desa, khususnya bendahara, bekerja lebih praktis hanya dengan satu kali input data. Walaupun laporan keuangan secara rinci tidak dipublikasikan langsung ke masyarakat, namun tetap disampaikan kepada pihak berwenang seperti Inspektorat dan BPK sebagai bentuk akuntabilitas. Dengan demikian, meskipun sistem pelaporan masih bersifat internal, penggunaan Siskeudes yang terstruktur dan selaras dengan prinsip akuntansi syariah dapat memperkuat transparansi, tanggung jawab moral, dan integritas dalam pengelolaan keuangan desa.

Penerapan sistem informasi akuntansi melalui aplikasi Siskeudes menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini sejalan dengan prinsip akuntansi syariah, khususnya nilai keadilan (*al-'adl*) dan pertanggungjawaban (*mas'uliyah*), di mana proses pencatatan dan pelaporan keuangan harus dilakukan secara jujur, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Arsyad, fitur-fitur dalam Siskeudes sudah sangat lengkap dan mempermudah penginputan, sehingga meminimalkan kesalahan serta mempercepat proses pelaporan. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi penggunaan dana desa, sebagaimana diungkapkan oleh berbagai informan seperti Pak Azis, Ibu Sittia, dan Bapak Yahya, mencerminkan penerapan nilai transparansi (*al-shafafiyah*). Walaupun masih ada keterbatasan dalam penyampaian informasi secara detail kepada seluruh warga, upaya untuk menyampaikan garis besar penggunaan anggaran melalui rapat desa, musyawarah, dan papan informasi menunjukkan komitmen pemerintah desa terhadap prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan publik.

Lebih jauh, penggunaan dana desa yang tepat sasaran dalam bentuk kegiatan nyata seperti pembangunan jalan tani, panggung lapangan, dan program posyandu, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Darna dan Bapak Tajuddin, menunjukkan bahwa alokasi anggaran telah diarahkan untuk kemaslahatan masyarakat. Hal ini selaras dengan semangat akuntansi syariah yang menekankan pada pemanfaatan harta publik secara adil dan sesuai kebutuhan umat. Di sisi lain, harapan dari masyarakat dan tokoh desa, seperti yang disampaikan oleh Friska Hamdana dan Pak Tamrin, menunjukkan perlunya peningkatan dalam aspek keterbukaan

informasi dan pemerataan pembangunan. Dengan demikian, prinsip-prinsip akuntansi syariah tidak hanya menjadi dasar etika dalam pencatatan dan pelaporan, tetapi juga menjadi pedoman dalam mewujudkan tata kelola dana desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berkeadilan sosial.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Sistem informasi akuntansi yang Digunakan di Desa Polewali Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi melalui aplikasi Siskeudes di Desa Polewali memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Seluruh proses keuangan dapat dilakukan dalam satu sistem terintegrasi, sehingga meminimalkan kesalahan dan mempercepat pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan.

##### **2. Peran Sistem Informasi Akuntansi Dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Polewali, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang**

Sistem informasi akuntansi berperan dalam meningkatkan transparansi, di mana pemerintah desa telah menyampaikan penggunaan dana desa melalui rapat dan papan informasi, meskipun masih perlu ditingkatkan agar lebih mudah diakses dan dipahami. Dari sisi akuntabilitas, aplikasi ini memudahkan pencatatan dan pelaporan keuangan secara sistematis dan efisien. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan juga memperkuat akuntabilitas publik, dan penggunaan dana desa telah diarahkan pada kegiatan yang bermanfaat seperti infrastruktur dan layanan sosial. Namun, tantangan seperti pemerataan pembangunan dan kualitas informasi masih ada. Karena itu, meski Siskeudes berperan penting, dibutuhkan komitmen



berkelanjutan dari pemerintah desa untuk meningkatkan implementasi, keterbukaan, dan pemerataan pembangunan.

### **3. Penerapan prinsip Akuntansi Syariah Pada Sistem Informasi Akuntansi yang Digunakan di Desa Polewali Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang**

Penerapan prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan Desa Polewali mendukung terwujudnya transparansi dan akuntabilitas. Melalui aplikasi Siskeudes, proses pencatatan dan pelaporan keuangan menjadi lebih mudah, rapi, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah seperti keadilan, pertanggungjawaban, dan keterbukaan. Meskipun informasi belum sepenuhnya disampaikan secara rinci ke masyarakat, pemerintah desa telah berupaya menyampaikan garis besar penggunaan dana melalui rapat dan papan informasi. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan menunjukkan tata kelola yang responsif dan berkeadilan, sesuai dengan semangat akuntansi syariah.

#### **B. Saran**

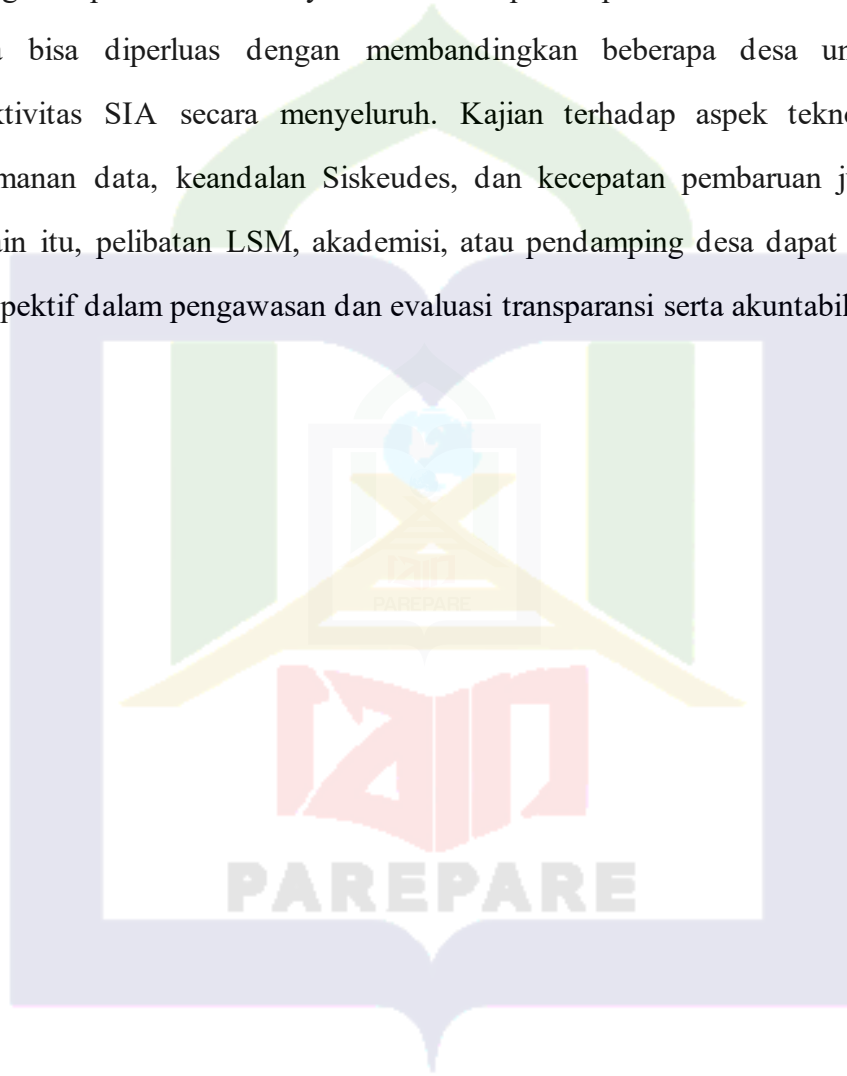
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

##### **1. Untuk Pemerintah Desa**

Pemerintah Desa Polewali disarankan untuk meningkatkan transparansi pengelolaan dana desa dengan menyampaikan informasi secara lebih jelas, sederhana, dan mudah diakses, misalnya melalui media sosial atau situs desa. Partisipasi warga dalam perencanaan dan evaluasi juga perlu diperkuat, serta pemerataan pembangunan antar dusun harus menjadi prioritas agar pemanfaatan dana desa adil dan sesuai kebutuhan.

## 2. Untuk penelitian selanjutnya

Penelitian ini masih dapat dikembangkan, misalnya dengan pendekatan kuantitatif atau mixed methods untuk hasil yang lebih objektif, terutama dalam mengukur pemahaman masyarakat terhadap transparansi dana desa. Lingkupnya juga bisa diperluas dengan membandingkan beberapa desa untuk menilai efektivitas SIA secara menyeluruh. Kajian terhadap aspek teknologi seperti keamanan data, keandalan Siskeudes, dan kecepatan pembaruan juga penting. Selain itu, pelibatan LSM, akademisi, atau pendamping desa dapat memperkaya perspektif dalam pengawasan dan evaluasi transparansi serta akuntabilitas.



## DAFTAR PUSTAKA

### *Al-Qur'an Al-Karim*

- Aditia mandela. "Analisis Sistem Informasi Akuntansi Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Desa Sukaraja Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)." Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Al, Fuad Khoirul et. *An Analysis in the Application of the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (Utaut) Model on Village Fund System (SISKEUDES) with Islamic Work Ethics as a Moderating Effect*. Lecture Notes in Networks and Systems, 2021.
- Alfina. "Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan APBdes Pemerintah Desa Kadingeh Kabupaten Enrekang (Analisis Akuntansi Syariah)." Parepare, 2022.
- Andrianto, Nico. *Good E-Government: Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Malang: Bayumedia, 2007.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2020.
- Ardana, I Cenik, and Hendro Lukman. *Sistem Informasi Akuntansi*. 1st ed. jakarta: Mitra Wacana Media, 2016.
- Arikunto, Suharismi. *Dasar-Dasar Research*. 1995: Tarsito, 1995.
- Basriyani, Anna, Nova Zulfani Panggabean, and Alfansuri Tanjung. *Akuntansi Syariah: Konsep, Historis Dan Implementasi*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2023.
- Dania, Anastasia, and Lilies Setiawati. *Sistem Informasi Akuntansi: Perencanaan, Proses, Dan Penerapan*. yogyakarta: C.V Andi Offset, 2011.
- Delone, and Mclean. *Information Systems Success: The Quest for the Dependent Variabel*. Information System Research, 2003.
- Frihatni, Andi Ayu, Nirwana, and Syamsuddin. "Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Parepare." *Ekonomi Dan Bisnis* 4 (2021).
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Hall, J. A. "Accounting Information Systems." *Cengage Learning*, 2018.
- Hannani, Saepudin, Fikri, Andi Nurindah Sari, Herdah, Andi Bahri S., Aris, Iskandar, Bahtiar, Muhammad Majdy Amiruddin, Sari Hidayati, Ni'mah Natsir, dan Abd.Rahman. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2023. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2023.
- asniati. "Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Analisis Dan Pelayanan Publik* 2, no. 1 (2016): 15–30.
- Indrayani. *Modul Sistem Informasi Akuntansi*. IAIN Parepare, 2022.

- Kaharuddin. "Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Keuangan Pada Pemerintah Desa Paladang Kabupaten Enrekang." Makassar, 2017.
- Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt, and Terry D. Warfield. *Intermediate Accounting: IFRS Edition*. Edited by John Wiley & Sons. 21st ed., 2010.
- Krismiaji. *Sistem Informasi Akuntansi (Edisi Keempat)*. UPP-STIM YKPN, 2015.
- Lalolo, Krina P. Loina. *Indikator & Alat Ukur Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Bappenas., 2003.
- M, Indriani, and Prasetyo W. "Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Dalam Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Desa." *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, 2022.
- Mardiasmo. "Perwujudan Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik, Suatu Sasaran Good Governance." *Jurnal Akuntansi Sektor Pemerintahan* 2 (2006).
- Mulyadi. *Sistem Akuntansi, Edisi 4*. Penerbit Salemba, 2023.
- Nova Argreshy. "Analisis Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Kanawatu Kabupaten Luwu Timur Di Tengah Pandemi Covid-19." Makassar: Universitas Bosowa, 2021.
- Nurcholis, Hanif. "HubuNurcholis, Hanif. 2011. 'Hubungan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Serta Peran Wakil Pemerintah.' *Journal of Government and Politics* 2 (2): 297–328. <https://doi.org/10.18196/jgp.2011.0017>. Ngan Pemerintahan Antara Pemerintah P." *Journal of Government and Politics* 2, no. 2 (2011): 297–328.
- "Pemerintah Indonesia. 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Pemerintah Nomor 43.," n.d.
- "Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa.," n.d.
- R, Supardi. "Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa." *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 2021.
- Rasul, Sjahrudin. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Dan Anggaran Dalam Perspektif UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*. Perum Percetakan Negara, Republik Indonesia, 2003.
- RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Edited by Syamil Qur'an. Bandung, 2019.
- Romney, Marshall B., and Paul John Steinbart. *Sistem Informasi Akuntansi = Accounting Information Systems*. 13th ed. Salemba Empat, 2015.
- Syaputra, E., Hilal, F. N., Febriansyah, M., Qaed, I., Amiruddin, M. M., & Ab Aziz, M. R. (2014). Maslahah as an Islamic source and its application in financial transactions. *Journal of Research in Humanities and Social Science*, 2(5), 66–71
- Sari, E. P., and N. Fitriani. "Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Pelaporan

Keuangan Desa: Studi Pada Desa-Desa Di Kabupaten Bantul.” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 2021.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. bandung: alfabeta, 2015.

Yanti, Riska. *Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan Desa Polewali Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang (Perspektif Akuntansi Syariah)*. Parepare, 2024.

Zubair, Muhammad Kamal. *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*. Parepare: institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020.





	<p align="center"><b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b>  <b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE</b>  <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM</b>  <b>Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp (0421) 21307</b></p>
	<p align="center"><b>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN</b></p>

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Saudara (i)

Di Tempat

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Bapak/Ibu/Saudara/i dalam rangka menyelesaikan karya (Skripsi) pada Jurusan Akuntansi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN) Parepare maka saya,

Nama : Nurvadillah


NIM : 2120203862202042

Judul : Peran Sistem Informasi Akuntansi terhadap Transpransi dan Akuntabilitas Dana Desa Polewali Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang

Untuk membantu kelancaran penelitian ini, Saya memohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk menjadi narasumber dalam penelitian kami. Kami ucapkan terima kasih,

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Hormat Saya

  
Nurvadillah  
 NIM: 2120203862202042

## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Pertanyaan Wawancara Untuk Staf Desa

1. Apakah desa Polewali menggunakan sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan dana desa, Apa nama atau jenis sistem yang digunakan?
2. Apakah perangkat desa telah mendapatkan pelatihan dalam penggunaan sistem ini?
3. Menurut Anda, apakah sistem tersebut sudah cukup membantu dalam pengelolaan keuangan?
4. Bagaimana bentuk keterbukaan laporan keuangan desa dan dalam bentuk apa?
5. Bagaimana proses pertanggungjawaban penggunaan dana desa dilakukan?
6. Sejauh mana sistem informasi akuntansi memudahkan penyusunan laporan pertanggungjawaban?
7. Menurut Anda, sejauh mana peran sistem informasi akuntansi dalam meningkatkan tata kelola keuangan dana desa?

### B. Pertanyaan Wawancara Untuk Masyarakat dan BPD

1. Menurut Bapak/Ibu apakah pemerintah desa terbuka dalam menyampaikan penggunaan dana desa?
2. Bagaimana cara penyampaian informasi penggunaan dana desa, Apakah ada media (seperti papan informasi, pertemuan warga, media sosial) yang digunakan untuk menyampaikan informasi dana desa?
3. Menurut Bapak/Ibu apakah dana desa digunakan sesuai kebutuhan masyarakat?
4. Apa kegiatan desa yang pernah Bapak/Ibu lihat atau ketahui, yang dananya berasal dari dana desa?
5. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap pengelolaan dana desa selama ini?
6. Apa harapan Bapak/Ibu ke depan agar dana desa dikelola lebih baik, terbuka, dan bertanggung jawab?

Pinrang, 13 Juni 2025

Mengetahui.

Pembimbing



Sulkarnain, S.E., M.Si

NIP 198805102019031005



## HASIL WAWANCARA

### Narasumber 1

#### Muhammad rasyid (kaur & operator Siskeudes)

1. Apakah desa Polewali menggunakan sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan dana desa, Apa nama atau jenis sistem yang digunakan?  
 “Untuk pengelolaan sistem informasi akuntansi yang digunakan di desa itu namanya aplikasi siskeudes”
2. Apakah perangkat desa telah mendapatkan pelatihan dalam penggunaan sistem ini?  
 “Ya, dilakukan pelatihan”
3. Menurut Anda, apakah sistem tersebut sudah cukup membantu dalam pengelolaan keuangan?  
 “Cukup membantu karena di dalam aplikasi tersebut sudah tersedia buku pembantu bank, buku kas umum, dan pelaporan lainnya yang dibutuhkan dalam satu kali penginputan, yang sangat membantu kaur atau bendahara dalam melakukan pelaporan. Dan terkait kendala untuk di desa polewali sendiri belum menemukan kendala terkait hal itu, karena aplikasi ini kerap kali diperbaiki setiap tahunnya, sehingga jika operator menemukan kendala bisa langsung disampaikan dan diperbaiki untuk kedepannya
4. Bagaimana bentuk keterbukaan laporan keuangan desa dan dalam bentuk apa?  
 “Kalau untuk laporan keuangannya di desa itu tidak di publikasikan secara sangat terbuka, ada yang memang disampaikan dan ada yang tidak, kami hanya menyampaikan melalui baliho transparansi desa yang dipasang di beberapa titik di desa polewali”
5. Bagaimana proses pertanggungjawaban penggunaan dana desa dilakukan?  
 “Ada dua cara yang pertama yaitu melalui aplikasi yang diperiksa langsung oleh inspektorat dan yang kedua itu di print out dan nanti diperiksa juga oleh inspektorat sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam bentuk hard file nya.”

6. Sejauh mana sistem informasi akuntansi memudahkan penyusunan laporan pertanggungjawaban?

“Sangat memudahkan karena sudah menyediakan beberapa fitur yang ada dalam aplikasi siskeudes yang sangat membantu kaur atau bendahara dalam melakukan pelaporan”

7. Menurut Anda, sejauh mana peran sistem informasi akuntansi dalam meningkatkan tata kelola keuangan dana desa?

“Kalau menurut saya, sistem informasi akuntansi itu sangat membantu, apalagi sekarang kita pakai Siskeudes. Semua pencatatan jadi lebih rapi, dari perencanaan sampai pertanggungjawaban. Jadi tidak asal catat manual kayak dulu. Jadi lebih transparan juga ke masyarakat”

## **Narasumber 2**

### **Muhammad Arsyad (Sekretaris Desa)**

1. Apakah desa Polewali menggunakan sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan dana desa, Apa nama atau jenis sistem yang digunakan?

“Untuk desa polewali sampai saat ini, itu menggunakan sistem informasi akuntansi yaitu aplikasi siskeudes dalam pengelolaan keuangannya baik itu dana desa, add, dan sumber pendapatan yang lain. Jadi, ini semacam program computer atau aplikasi yang dipakai untuk mengatur keuangan di desa”

2. Apakah perangkat desa telah mendapatkan pelatihan dalam penggunaan sistem ini?

“Ya, kita mendapatkan pelatihan setiap tahunnya melalui dinas pemberdayaan masyarakat desa/kabupaten, yang dilatih itu adalah operator yang memegang aplikasi ini”

3. Menurut Anda, apakah sistem tersebut sudah cukup membantu dalam pengelolaan keuangan?

“Kalo menurut saya sangat membantu, apalagi pengelolaan anggaran baik dana desa, add dan pendapatan yang lain karena aplikasinya sudah mencakup semua

pendapatan dan juga belanja yang ada di desa polewali, sudah ada semua di aplikasi nya”

4. Bagaimana bentuk keterbukaan laporan keuangan desa dan dalam bentuk apa?

“Kalau untuk laporan keuangan secara rinci hanya khusus untuk pemeriksaan seperti inspektorat atau BPK biasanya laporan tersebut diambil oleh pemerintah provinsi, dan pmd”

5. Bagaimana proses pertanggungjawaban penggunaan dana desa dilakukan?

“Kalau untuk pertanggungjawabannya, sampai saat ini kita buat laporan pertanggung jawaban pertahapny. Jadi setiap laporan itu kita memberikan semua disitu laporan bukti bukti, kwitansi, dan juga dokumentasi barang barang”

6. Sejauh mana sistem informasi akuntansi memudahkan penyusunan laporan pertanggungjawaban?

“Kalo aplikasi siskeudes itu bagus nya karena sudah terpisah antara pembiayaan, belanja, pendapatan”

7. Menurut Anda, sejauh mana peran sistem informasi akuntansi dalam meningkatkan tata kelola keuangan dana desa?

“Berperan sangat bagus karena dalam aplikasi tersebut semua sudah diuraikan dengan baik sehingga mempermudah penginputan”

### Narasumber 3

#### Tamrin (Ketua BPD)

1. Menurut Bapak/Ibu apakah pemerintah desa terbuka dalam menyampaikan penggunaan dana desa?

“Kalau saya lihat, pemerintah desa sudah cukup terbuka dalam menyampaikan penggunaan dana desa. Setiap ada kegiatan, biasanya dijelaskan dulu anggarannya di musyawarah. Laporan keuangannya juga disampaikan, meskipun kadang tidak terlalu rinci ke masyarakat umum. Tapi setidaknya sudah ada usaha ke arah transparansi”

2. Bagaimana cara penyampaian informasi penggunaan dana desa, Apakah ada media (seperti papan informasi, pertemuan warga, media sosial) yang digunakan untuk menyampaikan informasi dana desa?

“Selama ini informasi soal dana desa biasanya disampaikan lewat pertemuan warga, seperti musyawarah dusun atau musrenbang. Selain itu, ada juga papan informasi di kantor desa, jadi masyarakat bisa lihat langsung penggunaan dananya”

3. Menurut Bapak/Ibu apakah dana desa digunakan sesuai kebutuhan masyarakat?

“Kalau menurut saya, sejauh ini dana desa sudah cukup tepat sasaran. Kebanyakan dipakai buat kebutuhan yang memang penting.”

4. Apa kegiatan desa yang pernah Bapak/Ibu lihat atau ketahui, yang dananya berasal dari dana desa?

“Salah satu kegiatan yang pakai dana desa itu pembangunan jalan tani. Itu dulunya susah dilalui kalau hujan, tapi sekarang sudah bagus.”

5. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap pengelolaan dana desa selama ini?

“Pengelolaan dana desa selama ini sudah lumayan baik. Kegiatannya juga sesuai dengan apa yang direncanakan saat musyawarah. Tapi memang masih perlu ditingkatkan dari segi pelaporan ke masyarakat, supaya makin terbuka.”

6. Apa harapan Bapak/Ibu ke depan agar dana desa dikelola lebih baik, terbuka, dan bertanggung jawab?

“Harapan saya tata kelola yang selama ini dilaksanakan oleh pihak desa itu dipertahankan. Dan kalau perlu lebih ditingkatkan sehingga setiap kegiatan dilaksanakan oleh pihak desa itu dapat diterima dan dinikmati oleh semua lapisan masyarakat desa khususnya masyarakat desa Polewali, untuk pembangunan nya juga saya berharap bisa lebih merata disetiap dusun”

#### Narasumber 4

##### Azis (Anggota BPD)

1. Menurut Bapak/Ibu apakah pemerintah desa terbuka dalam menyampaikan penggunaan dana desa?  
“Menurut saya cukup terbuka, karena selalu diinformasikan melalui rapat mengenai berapa realisasi dana desa untuk tahun sebelumnya”
2. Bagaimana cara penyampaian informasi penggunaan dana desa, Apakah ada media (seperti papan informasi, pertemuan warga, media sosial) yang digunakan untuk menyampaikan informasi dana desa?  
“Ada juga papan informasi di balai desa yang isinya laporan penggunaan dana. Kalau warga tidak sempat ikut rapat, bisa baca di papan itu”
3. Menurut Bapak/Ibu apakah dana desa digunakan sesuai kebutuhan masyarakat?  
“Kalau saya lihat, sebagian besar dana desa memang dipakai sesuai dengan kebutuhan masyarakat”
4. Apa kegiatan desa yang pernah Bapak/Ibu lihat atau ketahui, yang dananya berasal dari dana desa?  
“Ada panggung untuk acara 17 yang sedang di bangun sekarang”
5. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap pengelolaan dana desa selama ini?  
“sudah cukup transparan”
6. Apa harapan Bapak/Ibu ke depan agar dana desa dikelola lebih baik, terbuka, dan bertanggung jawab?  
“Saya harap proses musyawarah bisa lebih aktif melibatkan semua elemen masyarakat, supaya dana desa benar-benar menjawab kebutuhan semua kalangan, bukan hanya kelompok tertentu.”

#### Narasumber 5

##### Tajuddin (Anggota BPD)

1. Menurut Bapak/Ibu apakah pemerintah desa terbuka dalam menyampaikan penggunaan dana desa?  
“Laporan keuangan desa sudah terbuka, terutama dalam hal pelaporan kegiatan dan penggunaannya. Kita di BPD dilibatkan, dan masyarakat juga bisa melihat informasi lewat papan desa. Tapi mungkin untuk pemahaman masyarakat yang

lebih luas, perlu ditingkatkan cara penyampaiannya biar makin mudah dimengerti”

2. Bagaimana cara penyampaian informasi penggunaan dana desa, Apakah ada media (seperti papan informasi, pertemuan warga, media sosial) yang digunakan untuk menyampaikan informasi dana desa?

“Kalau disini, biasanya info soal dana desa disampaikan pas ada pertemuan warga, seperti musyawarah. Terus ada juga papan informasi di depan kantor desa, jadi warga bisa liat langsung dana dipakai buat apa.”

3. Menurut Bapak/Ibu apakah dana desa digunakan sesuai kebutuhan masyarakat?

“Kami di BPD selalu diajak diskusi sebelum dana desa digunakan. Jadi, insya Allah penggunaannya sudah mengarah ke hal-hal yang dibutuhkan masyarakat. Walaupun mungkin belum semuanya terpenuhi, tapi pemerintah desa berusaha menyesuaikan dengan kondisi yang ada.”

4. Apa kegiatan desa yang pernah Bapak/Ibu lihat atau ketahui, yang dananya berasal dari dana desa?

“ada ji seperti pembangunan jalan beton, panggung di lapangan, ada juga biasa timbunan untuk jalan.”

5. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap pengelolaan dana desa selama ini?

“Selama ini pengelolaan dana desa saya nilai sudah berjalan sesuai aturan”

6. Apa harapan Bapak/Ibu ke depan agar dana desa dikelola lebih baik, terbuka, dan bertanggung jawab?

“Yang paling penting menurut saya, aparat desa tetap menjaga integritas seperti sekarang. Dana desa itu besar, jadi harus dikelola dengan tanggung jawab dan tidak sembarangan, supaya manfaatnya benar-benar sampai ke masyarakat.”

## Narasumber 6

### Hj. Rahmawati (Anggota BPD)

1. Menurut Bapak/Ibu apakah pemerintah desa terbuka dalam menyampaikan penggunaan dana desa?  
 “Kalau saya lihat, pemerintah desa sudah cukup terbuka dalam menyampaikan penggunaan dana desa. Setiap ada kegiatan, biasanya dijelaskan dulu anggarannya di musyawarah. Laporan keuangannya juga disampaikan, meskipun kadang tidak terlalu rinci ke masyarakat umum. Tapi setidaknya sudah ada usaha ke arah transparansi.”
2. Bagaimana cara penyampaian informasi penggunaan dana desa, Apakah ada media (seperti papan informasi, pertemuan warga, media sosial) yang digunakan untuk menyampaikan informasi dana desa?  
 “Di kantor desa ada papan informasi yang ditempel anggaran yang digunakan.”
3. Menurut Bapak/Ibu apakah dana desa digunakan sesuai kebutuhan masyarakat?  
 “Kebanyakan memang sesuai kebutuhan masyarakat, terutama yang menyangkut pembangunannya, saya rasa sudah cukup sesuai”
4. Apa kegiatan desa yang pernah Bapak/Ibu lihat atau ketahui, yang dananya berasal dari dana desa?  
 “Waktu pandemi kemarin, dana desa juga dipakai untuk BLT ke warga yang. Itu sangat terasa manfaatnya karena banyak yang kehilangan penghasilan waktu itu.”
5. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap pengelolaan dana desa selama ini?  
 “Kalau saya lihat selama ini pengelolaannya sudah lumayan bagus, soalnya program-program yang dijalankan juga sesuai hasil musyawarah. Tapi ya, kadang masih ada juga warga yang kurang paham soal dananya dipakai buat apa, jadi sosialisasinya perlu ditambah.”
6. Apa harapan Bapak/Ibu ke depan agar dana desa dikelola lebih baik, terbuka, dan bertanggung jawab?  
 “Kalau bisa, musyawarahnya diperluas. Jadi nggak cuma orang-orang tertentu yang hadir, tapi semua lapisan warga bisa kasih usul.”

## Narasumber 7

### Sattia (Masyarakat)

1. Menurut Bapak/Ibu apakah pemerintah desa terbuka dalam menyampaikan penggunaan dana desa?

“Menurut saya, pemerintah desa lumayan terbuka, memang disampaikan pas ada pertemuan atau musyawarah desa, tapi nda semua warga tahu detailnya. Kadang kita hanya tahu garis besarnya saja, Jadi ya, bisa dibilang terbuka, tapi nda maksimal pi”

2. Bagaimana cara penyampaian informasi penggunaan dana desa, Apakah ada media (seperti papan informasi, pertemuan warga, media sosial) yang digunakan untuk menyampaikan informasi dana desa?

“Biasanya pemerintah desa sampaikan informasi lewat rapat warga. Kalau ada pembangunan atau bantuan, biasanya diumumkan pas pertemuan. Selain itu, ada juga papan informasi di depan kantor desa, tapi kadang kurang lengkap isinya.”

3. Menurut Bapak/Ibu apakah dana desa digunakan sesuai kebutuhan masyarakat?

“Kalau menurut saya, dana desa sudah lumayan pas penggunaannya. Karena banyak program kayak perbaikan jalan dan bantuan buat warga yang memang dibutuhkan.”

4. Apa kegiatan desa yang pernah Bapak/Ibu lihat atau ketahui, yang dananya berasal dari dana desa?

“Yang sangat terasa itu pembangunan jalannya.”

5. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap pengelolaan dana desa selama ini?

“Saya rasa masih ada yang perlu diperbaiki. Kadang kegiatan sudah jalan, tapi masyarakat tidak tahu jelas.”



6. Apa harapan Bapak/Ibu ke depan agar dana desa dikelola lebih baik, terbuka, dan bertanggung jawab?

“Semoga yang mengelola dana desa tetap amanah dan lebih terbuka lagi untuk kedepannya.”

## **Narasumber 8**

### **Darna (Masyarakat)**

1. Menurut Bapak/Ibu apakah pemerintah desa terbuka dalam menyampaikan penggunaan dana desa?

“Sampai sekarang laporan keuangan desa disampaikan secara terbuka, khususnya di forum-forum resmi seperti musdes.”

2. Bagaimana cara penyampaian informasi penggunaan dana desa, Apakah ada media (seperti papan informasi, pertemuan warga, media sosial) yang digunakan untuk menyampaikan informasi dana desa?

“Waktu ada kegiatan desa, kayak pembangunan jalan atau pembagian BLT, itu diumumkan pas musyawarah warga”

3. Menurut Bapak/Ibu apakah dana desa digunakan sesuai kebutuhan masyarakat?

“Kalau dilihat dari pembangunan yang ada, sudah cukup bagus”

4. Apa kegiatan desa yang pernah Bapak/Ibu lihat atau ketahui, yang dananya berasal dari dana desa?

“kalo yang kuliat itu ada beberapa kegiatan yang dananya dari dana desa. Contohnya jalan tani di belakang, yang dulunya becek dan susah dilalui, sekarang sudah dibeton jadi lebih gampang ki kalau mau angkut hasil panen. Terus ada juga panggung yang baru dibangun di lapangan, itu katanya buat acara 17 Agustus nanti, jadi disiapkan dari sekarang. Waktu posyandu, itu juga pakai dana

desa, ada makanan tambahan buat anak-anak, Jadi memang banyak kegiatan yang kita bisa lihat langsung, dan memang terasa manfaatnya buat warga”

5. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap pengelolaan dana desa selama ini?

“Saya lihat pemerintah desa cukup terbuka, terutama kalau ada rapat dusun. Warga bisa kasih usul dan tahu kegiatan apa yang mau dijalankan.

6. Apa harapan Bapak/Ibu ke depan agar dana desa dikelola lebih baik, terbuka, dan bertanggung jawab?

“Saya harap pengelolaannya jangan cuma fokus ke pembangunan fisik, tapi juga kegiatan sosial, kayak bantuan pendidikan buat anak-anak atau penyuluhan kesehatan.”

#### **Narasumber 9**

##### **Muhammad Yahya (Masyarakat)**

1. Menurut Bapak/Ibu apakah pemerintah desa terbuka dalam menyampaikan penggunaan dana desa?

“Menurut saya, pemerintah desa sudah cukup terbuka dalam menyampaikan penggunaan dana desa. Biasanya kalau ada kegiatan yang dananya dari desa, disampaikan lewat rapat atau papan pengumuman. Masyarakat juga bisa lihat langsung hasilnya di lapangan”

2. Bagaimana cara penyampaian informasi penggunaan dana desa, Apakah ada media (seperti papan informasi, pertemuan warga, media sosial) yang digunakan untuk menyampaikan informasi dana desa?

“Informasi dana desa itu kadang ditempel di papan pengumuman”

3. Menurut Bapak/Ibu apakah dana desa digunakan sesuai kebutuhan masyarakat?

“Kalau saya ya sudah sesuai kebutuhan masyarakat, kalo ada masukan dari warga juga bisa disampaikan pada saat rapat jadi kebutuhan yang kita mau itu bisa direalisasikan jika memang bagus.”

4. Apa kegiatan desa yang pernah Bapak/Ibu lihat atau ketahui, yang dananya berasal dari dana desa?

“Saya lihat ada pengadaan alat olahraga di lapangan desa, kayak bola dan net. Katanya itu dari dana desa juga, biar anak muda ada kegiatan positif.”

5. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap pengelolaan dana desa selama ini?

“Selama ini sepertinya sudah bagus, apalagi waktu ada BLT. Tapi saya juga harap pengurus desa lebih sering tanya pendapat warga sebelum menentukan kegiatan.”

6. Apa harapan Bapak/Ibu ke depan agar dana desa dikelola lebih baik, terbuka, dan bertanggung jawab?

“Saya harap dana desa bisa lebih cepat direalisasikan. Kadang programnya sudah diumumkan, tapi pelaksanaannya menunggu lama.”

#### **Narasumber 10**

##### **Sulaiman (Masyarakat)**

1. Menurut Bapak/Ibu apakah pemerintah desa terbuka dalam menyampaikan penggunaan dana desa?

“Iya, karena kalau ada rapat dihadiri para warga, tokoh agama, dan yang lain dalam hal perencanaan pembangunan yang menggunakan dana desa”

2. Bagaimana cara penyampaian informasi penggunaan dana desa, Apakah ada media (seperti papan informasi, pertemuan warga, media sosial) yang digunakan untuk menyampaikan informasi dana desa?

“Ada papan informasi seperti spanduk pernah saya lihat”

3. Menurut Bapak/Ibu apakah dana desa digunakan sesuai kebutuhan masyarakat?

“Saya lihat dana desa banyak dipakai buat hal-hal yang penting, kayak bantuan langsung tunai dan perbaikan fasilitas umum”

4. Apa kegiatan desa yang pernah Bapak/Ibu lihat atau ketahui, yang dananya berasal dari dana desa?

“Setahu saya, ada juga bantuan untuk ibu hamil dan balita, seperti makanan tambahan dan vitamin. Itu dari dana desa juga, lewat posyandu.”

5. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap pengelolaan dana desa selama ini?

“Saya lihat pengelolaannya sudah baik, soalnya tiap tahun ada kegiatan yang bermanfaat.”

6. Apa harapan Bapak/Ibu ke depan agar dana desa dikelola lebih baik, terbuka, dan bertanggung jawab?

“Harapan saya dana desa dikelola dengan jujur dan bertanggung jawab.”

#### **Narasumber 11**

##### **Friska Hamdana (Masyarakat)**

1. Menurut Bapak/Ibu apakah pemerintah desa terbuka dalam menyampaikan penggunaan dana desa?

“Kalau menurut saya, pemerintah desa sudah berusaha terbuka, tapi belum semua warga tahu atau ngerti informasinya. Mungkin karena penyampaiannya masih kurang merata, cuma lewat papan informasi atau pas musyawarah saja”

2. Bagaimana cara penyampaian informasi penggunaan dana desa, Apakah ada media (seperti papan informasi, pertemuan warga, media sosial) yang digunakan untuk menyampaikan informasi dana desa?

“Biasanya lewat baliho dan rapat desa”

3. Menurut Bapak/Ibu apakah dana desa digunakan sesuai kebutuhan masyarakat?

“seperti nya memang sudah sesuai kebutuhan masyarakat”

4. Apa kegiatan desa yang pernah Bapak/Ibu lihat atau ketahui, yang dananya berasal dari dana desa?

“Dana desa pernah dipakai untuk perbaikan jalan tani. Sekarang juga sebagian jalan yang tidak ter aspal sudah di beton jadi jalan sudah bagus.”

5. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap pengelolaan dana desa selama ini?

“kalo saya selama ini sudah cukup baik, hanya perlu ditingkatkan untuk tranparansi nya supaya masyarakat itu semuanya bisa jangkau informasi nya.”

6. Apa harapan Bapak/Ibu ke depan agar dana desa dikelola lebih baik, terbuka, dan bertanggung jawab?

“Semoga pengelolaan dananya makin terbuka. Kalau bisa, semua dusun sebagian kegiatan yang merata.”

## **Narasumber 12**

### **Nurul (Masyarakat)**

1. Menurut Bapak/Ibu apakah pemerintah desa terbuka dalam menyampaikan penggunaan dana desa?

“Iya, saya liat-liat pemerintah desa biasa umumkan juga kalau ada kegiatan dari dana desa”

2. Bagaimana cara penyampaian informasi penggunaan dana desa, Apakah ada media (seperti papan informasi, pertemuan warga, media sosial) yang digunakan untuk menyampaikan informasi dana desa?

“Biasanya informasi soal dana desa itu disampaikan lewat rapat dusun atau musyawarah desa. Jadi kalau ada pembangunan atau kegiatan yang mau dikerjakan, diundang ki dulu warga untuk dikasih tahu rencana dan anggarannya. Selain itu saya pernah lihat ada papan informasi di depan kantor desa yang ditempel daftar anggaran dan kegiatan. Tapi kadang tulisannya kecil dan tidak terlalu jelas, apalagi kalau kita nda biasa baca angka-angka. Jadi memang ada media yang digunakan, tapi lebih efektif kalau langsung disampaikan waktu rapat.”

3. Menurut Bapak/Ibu apakah dana desa digunakan sesuai kebutuhan masyarakat?

“Ya, sebagian besar digunakan sesuai kebutuhan, tapi ada juga warga yang merasa kurang dilibatkan waktu perencanaan. Sebenarnya perlu kepekaan juga dari masyarakat nya supaya lebih aktif dalam mencari informasi tentang anggaran desa itu”

4. Apa kegiatan desa yang pernah Bapak/Ibu lihat atau ketahui, yang dananya berasal dari dana desa?

“Ada kegiatan sosial juga yang kadang diadakan dan itu dibiayai dari dana desa.”

5. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap pengelolaan dana desa selama ini?

“Saya pribadi nggak terlalu ngerti semua pengeluarannya, tapi kalau dilihat dari hasilnya ya ada perubahan. Jalan kampung sudah bagus, itu tandanya dana dipakai.”

6. Apa harapan Bapak/Ibu ke depan agar dana desa dikelola lebih baik, terbuka, dan bertanggung jawab?

“Harapan saya, kepala desa dan perangkatnya bisa benar-benar amanah.”



DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
NOMOR : B-4399/In.39/FEBI.04/PP.00.9/09/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAEREPARE

- Menimbang a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi/tugas akhir mahasiswa FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa tahun 2024
- b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk disertai tugas sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan : a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2..307381/2024, tanggal 24 November 2023 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2024
- b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: 361 Tahun 2024 Tahun 2024, tanggal 21 Pebruari 2024 tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : a. Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2024
- b. Menunjuk saudara: **Sulkarnain, M.Si**, sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir bagi mahasiswa :
- Nama Mahasiswa : NURVADILLAH
- NIM : 2120203862202042
- Program Studi : Akuntansi Syari'ah
- Judul Penelitian : PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGY INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DANA DESA POLEWALI KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG
- c. Tugas pembimbing adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi/tugas akhir;
- d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
- e. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Parepare  
Pada tanggal 23 September 2024  
Dekan.



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP 197102082001122002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
 PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

**BERITA ACARA**  
**REVISI JUDUL SKRIPSI**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : NURVADILLAH  
 N I M : 2120203862202042  
 Prodi : Akuntansi Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

**PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGY INFORMASI AKUNTANSI  
 TERHADAP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DANA DESA POLEWALI  
 KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG**

Telah diganti dengan judul baru:

**PERAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP TRANSPARANSI DAN  
 AKUNTABILITAS DANA DESA POLEWALI KECAMATAN SUPPA KABUPATEN  
 PINRANG**

dengan alasan / dasar:

Menggunakan kalimat pengaruh yang merujuk pada metode  
penelitian kuantitatif, sedangkan metode yang digunakan kualitatif

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 29 Juli 2025

Pembimbing Utama

  
 Sulikarnaio, M.Si.



Mengetahui  
 Dekan,  
 Prof. Dr. Muzdahir Muhammadun, M.Ag.,  
 NIP. 197102082001122002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-2386/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2025

02 Juni 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di  
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: NURVADILLAH
Tempat/Tgl. Lahir	: BELA BELAWA, 29 September 2003
NIM	: 2120203862202042
Fakultas / Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Syari'ah
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: BELA-BELAWA, DESA POLEWALI, KECAMATAN SUPPA, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**PERAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DANA DESA POLEWALI KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 03 Juni 2025 sampai dengan tanggal 03 Juli 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



## PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

### DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

#### UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
 Nomor : 503/0335/PENELITIAN/DPMTSP/06/2025  
 Tentang ..

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 05-06-2025 atas nama NURVADILLAH, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan :

1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0476/R/T.Teknis/DPMTSP/06/2025, Tanggal : 12-06-2025
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0336/BAP/PENELITIAN/DPMTSP/06/2025, Tanggal : 12-06-2025

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga : Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang Parepare
3. Nama Peneliti : NURVADILLAH
4. Judul Penelitian : Peran Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Desa Polewali Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang
5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian : Masyarakat, Perangkat Desa dan BPD
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Suppa

**KEDUA** : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 12-12-2025.

**KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 13 Juni 2025



Biaya : Rp 0,-

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

**ANDI MIRANI, AP. M. Si**

NIP. 197406031993112001

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP**

Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang





**Balai Sertifikasi Elektronik**







Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E

**DPMTSP**



## PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

### KECAMATAN SUPPA

### DESA POLEWALI

Alamat :Jalan. Majakka-Lotang Salo, Kode Pos 91272

#### SURAT KETERANGAN TELAH MENYELESAIKAN PENELITIAN

Nomor : 328 / PW / VI / 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, An. Kepala Desa Polewali Kec.Suppa :

N a m a : MUHAMMAD ARSYAD, S.Ak

Jabatan : Sekretaris

Alamat : Polewali

Menerangkan bahwa nama yang tersebut di bawah ini :

Nama : NURVADILLAH

NIM : 2120203862202042

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi : Akutansi Syariah

Benar yang tersebut namanya di atas telah melaksanakan Penelitian Skripsi di Desa Polewali dengan Judul **“PERAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DANA DESA POLEWALI KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG** “, Selama 16 Hari mulai tanggal 03 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Juni 2025

Demikian surat keterangan ini kami buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bela-belawa, 24 Juni 2025  
An. Kepala Desa Polewali  
Sekretaris

  
MUHAMMAD ARSYAD, S.Ak



**IDENTITAS INFORMAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hj. Rahmawati  
Alamat : Sangka - sangkae  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Umur : 56

Menerangkan bahwa,

Nama : Nurvadillah  
Nim : 2120203862202042  
Program Studi : Akuntansi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Peran Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Desa Polewali kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang."

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, ..... 6 Juni ..... 2025

Yang bersangkutan

  
Rahmawati

**IDENTITAS INFORMAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SATTIA  
Alamat : POLEWALI  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Umur : 60

Menerangkan bahwa,

Nama : Nurvadillah  
Nim : 2120203862202042  
Program Studi : Akuntansi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Peran Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Desa Polewali kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.”

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 05 Juni 2025

Yang bersangkutan

  
SATTIA

**IDENTITAS INFORMAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Friska Hamdana .  
Alamat : Bela- Belawa .  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Umur : 22 Tahun .  
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa,

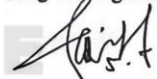
Nama : Nurvadillah  
Nim : 2120203862202042  
Program Studi : Akuntansi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Peran Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Desa Polewali kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang."

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 10 Juni 2025

Yang bersangkutan

  
Friska Hamdana.

**IDENTITAS INFORMAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Yahya S,E

Alamat : Bela-belawa

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 59

Pekerjaan : Purna bakti

Menerangkan bahwa,

Nama : Nurvadillah

Nim : 2120203862202042

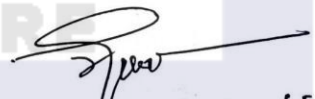
Program Studi : Akuntansi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Peran Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Desa Polewali kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang."

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 19 Juni 2025

Yang bersangkutan

  
Muhammad yahya S,E

**IDENTITAS INFORMAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TAMRIN  
Alamat : LADEA  
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI  
Umur : 68 56

Menerangkan bahwa,

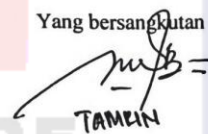
Nama : Nurvadillah  
Nim : 2120203862202042  
Program Studi : Akuntansi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Peran Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Desa Poiewali kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang."

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 05 Juni 2025

Yang bersangkutan

  
TAMRIN



**IDENTITAS INFORMAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sulaiman  
Alamat : Ladea  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Umur : 38 tahun.  
Pekerjaan : Wira swasta.

Menerangkan bahwa,

Nama : Nurvadillah  
Nim : 2120203862202042  
Program Studi : Akuntansi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Peran Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Desa Polewali kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang."

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 00 Juni 2025

Yang bersangkutan

  
Sulaiman

**IDENTITAS INFORMAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul  
Alamat : Bela-belawa  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Umur : 47  
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa,

Nama : Nurvadillah  
Nim : 2120203862202042  
Program Studi : Akuntansi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Peran Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Desa Polewali kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang."

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 19 Juni 2025

Yang bersangkutan

  
nurul

## IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Arsyad, S.Ak  
Alamat : Dusun Polewali  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Umur : 27 Tahun

Menerangkan bahwa,

Nama : Nurvadillah  
Nim : 2120203862202042  
Program Studi : Akuntansi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Peran Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Desa Polewali kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang."

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 04-05-2025

Yang bersangkutan

Muhammad Arsyad, S.Ak

**IDENTITAS INFORMAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD RASYID,SE  
Alamat : DUSUN LADEA, DESA POLEWALI  
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI  
Umur : 26 TAHUN

Menerangkan bahwa,

Nama : Nurvadillah  
Nim : 2120203862202042  
Program Studi : Akuntansi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Peran Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Desa Polewali kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang."

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 4 Juni 2025

Yang bersangkutan



MUHAMMAD RASYID,SE

## IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Darna  
Alamat : Bela-Belawa  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Umur : 47  
Pekerjaan : Kader posyandu

Menerangkan bahwa,

Nama : Nurvadillah  
Nim : 2120203862202042  
Program Studi : Akuntansi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Peran Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Desa Polewali kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang."

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 18 Juni 2025

Yang bersangkutan

*Darna*  
Darna

## IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aziz  
Alamat : Bela-belawa  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Umur : 52

Menerangkan bahwa,

Nama : Nurvadillah  
Nim : 2120203862202042  
Program Studi : Akuntansi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Peran Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Desa Polewali kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang."

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 4 Juni 2025

Yang bersangkutan

Aziz

**IDENTITAS INFORMAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tajuddin  
Alamat : Bela - belawa  
Jenis Kelamin : laki - laki  
Umur : 58  
Pekerjaan : Anggota BPD

Menerangkan bahwa,

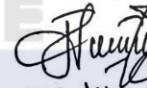
Nama : Nurvadillah  
Nim : 2120203862202042  
Program Studi : Akuntansi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Peran Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Desa Polewali kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang."

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 19 Juni 2025

Yang bersangkutan

  
Tajuddin





Wawancara dengan Muhammad Rasyid S.E (Bendahara Desa)



Wawancara dengan Muhammad Arsyad S.Ak (Sekretaris Desa)





Wawancara dengan bapak Tamrin (Ketua BPD)



Wawancara dengan bapak Azis (Anggota BPD)



Wawancara dengan bapak Tajuddin (anggota BPD)



Wawancara dengan ibu Hj. Rahmawati (anggota BPD)





Wawancara dengan ibu Sattia (masyarakat)



Wawancara dengan bapak Sulaiman (Masyarakat)



Wawancara dengan bapak Muhammad Yahya S.E (Masyarakat)



Wawancara dengan Saudari Friska hamdana (Masyarakat)

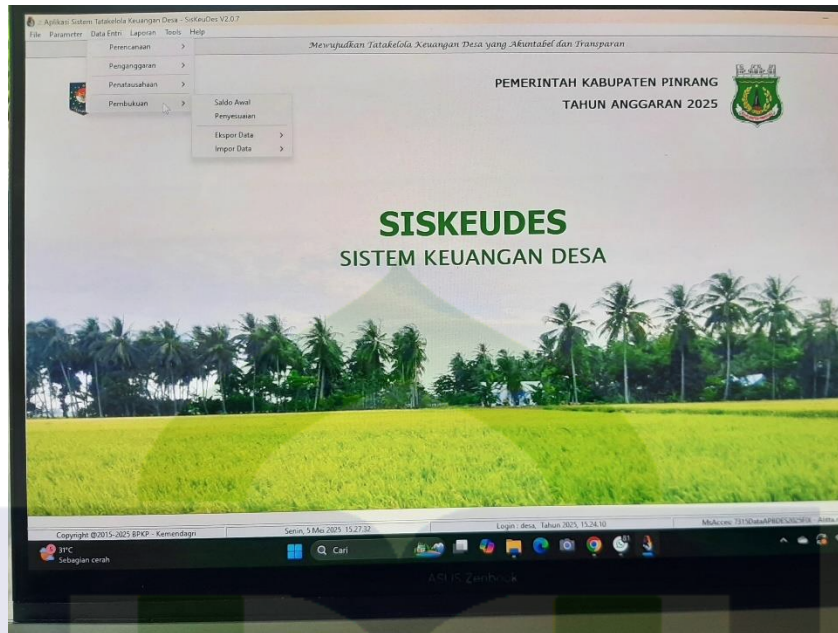




Wawancara dengan ibu nurul (Masyarakat)



Wawancara dengan ibu Darna (Masyarakat)

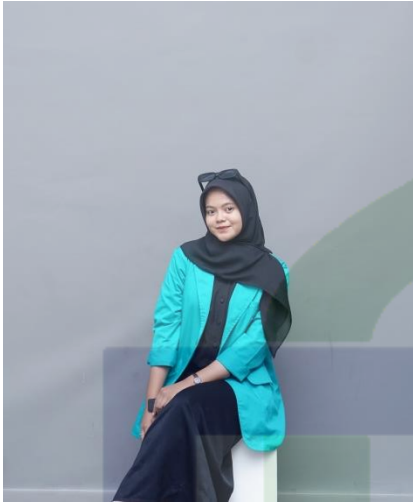


SIA yang digunakan yaitu aplikasi Siskeudes



Baliho Transparansi

## BIODATA PENULIS



**NURVADILLAH**, lahir di Bela-Belawa pada tanggal 29 September 2003. Anak pertama dari 2 bersaudara yang lahir dari pasangan bapak Tamrin dan Ibu Rusna. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis memulai pendidikan dasar di SDN 107 Bela-Belawa pada tahun 2009-2015. Kemudian melanjutkan pendidikan di tingkat menengah pertama di SMP Negeri 1 Suppa pada tahun 2015-2018. Lalu melanjutkan pendidikan di sekolah kejuruan dengan jurusan Akuntansi dan Lembaga Keuangan di SMK Negeri 3 Pinrang pada tahun 2018-2021. Di tahun yang sama, penulis melanjutkan studi ke jenjang S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan memilih program studi Akuntansi Syariah. Penulis melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di kantor Badan Amil Zakat (BAZNAZ) Polewali

Mandar pada tahun 2024, kemudian melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Tapango Barat, Kecamatan Tapango kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2024 dan menyelesaikan tugas akhirnya yang berjudul “Peran Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Desa Polewali Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang”.